Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.027/BAN-PT/Ak-XII/SI/IX/2009

Upaya WWF-Indonesia Dalam Penanggulangan Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo Initiative (2007-2013)

Skripsi

Oleh

Bajik Assora

2010330225

Bandung

2017

Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.027/BAN-PT/Ak-XII/SI/IX/2009

Upaya WWF-Indonesia Dalam Penanggulangan Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo Initiative (2007-2013)

Skripsi

Oleh

Bajik Assora

2010330225

Pembimbing

P. Y. Nur Indro, Drs, M.Si.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Bajik Assora
Nomor Pokok : 2010330225
Judul : Upaya WWF-Indonesia Dalam Penanggulangan Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo Initiative (2007-2013)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 7 Agustus 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S : ___________________________

Sekretaris
P. Y. Nur Indro, Drs., M.Si. : ___________________________

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP, M.A : ___________________________

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bajik Assora
NPM : 2010330225
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya WWF-Indonesia Dalam Penanggulangan Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo Initiative (2007-2013)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juni 2017

Bajik Assora

ABSTRAK

Nama : Bajik Assora

NPM : 2010330225

Judul : Upaya WWF Indonesia Dalam Menanggulangi Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative (2007-2013)

Pulau Kalimantan memiliki peran yang penting dalam kelestarian lingkungan hidup di dunia. Selain memiliki cadangan hutan hujan tropis terbesar di Asia Tenggara, pulau ini juga memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati yang secara langsung bermanfaat bagi kelangsungan hidup setiap ekosistem yang berada di dalamnya. Namun demikian, terdapat ancaman kerusakan ekosistem jangka panjang yang disebabkan oleh fenomena deforestasi hutan yang dilakukan manusia dan terjadi dalam waktu yang lama. Ditinjau dari kondisi geografi Kalimantan yang mencakup hingga tiga negara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam), usaha penanganan dan penanggulangan dampak dari deforestasi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa upaya pelestarian yang terintegrasi antar-wilayah dan bersifat lintas batas. Tantangan pengoordinasian kebijakan antar-negara tersebut memerlukan adanya aktor non-negara seperti NGO guna memediasi setiap kepentingan dari masing-masing negara.

Dalam penelitian ini dideskripsikan upaya-upaya WWF Indonesia dalam usaha menanggulangi deforestasi kawasan hutan hujan tropis yang terjadi di pulau Kalimantan melalui kerangka kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative periode tahun 2007 hingga 2013. Akan dijabarkan mengenai bagaimana peran organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) dalam melaksanakan usaha konservasi lingkungan hidup lintas batas, terutama melalui pembangunan kerja sama antar-pihak yang terlibat. Dalam kasus pulau Kalimantan, kerja sama tersebut terlihat dari pendirian HoB Initiative sebagai platform alternatif dalam usaha pelestarian lingkungan hidup di Kalimantan.

Kata Kunci : Deforestasi, Kalimantan, HoB Initiative, WWF Indonesia.

ABSTRACT

Name : Bajik Assora

NPM : 2010330225

Title : *The WWF Indonesia's efforts on Overcoming Deforestation in Borneo Island Through Heart of Borneo (HoB) Initiative Platform* (2007-2013)

The island of Borneo has an important role in environmental sustainability in the world. Besides having the largest tropical rainforest reserves in Southeast Asia, the island also has a wide range of biodiversity that directly benefits the survival of every ecosystem within it. However, there is a threat of long-term ecosystem destruction caused by deforestation phenomenon that occurs over a long period of time. Judging from the geography condition of Borneo that encompasses up to three countries (Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam), deforestation mitigation and mitigation efforts can not be undertaken without integrated conservation efforts between regions and are cross-border. The challenge of coordinating these intergovernmental policies requires the existence of non-state actors such as NGOs to mediate the interests of each country.

This study describes WWF Indonesia's efforts to tackle deforestation of tropical rainforest on Kalimantan island through the Heart of Borneo (HoB) Initiative framework from 2007 to 2013. To describe how the role of non-Governmental Organization / NGO) in carrying out cross-border environmental conservation efforts, primarily through the development of inter-party cooperation. In the case of Borneo Island, the cooperation is seen from the establishment of HoB Initiative as an alternative platform for environmental conservation in Kalimantan.

Keyword(s): Deforestation, Borneo, HoB Initiative, WWF Indonesia.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan atas rahmat dan karunianya, sehingga penelitian yang berjudul "Upaya WWF Indonesia Dalam Menanggulangi Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative (2007-2013)" dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat kelulusan program S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada P.Y Nur Indro, dosen pembimbing penulis yang sejak pertemuan pertama sudah memberikan dukungan moral dan semangat yang tak ternilai harganya. Selain itu, penelitian ini tak mungkin selesai tanpa dukungan dari segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAR. Segala yang baik dari karya ini adalah milik mereka juga, adapun kesalahan dan kealpaannya, biarlah jadi milik penulis semata-mata.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangan sederhana bagi studi ilmu hubungan internasional pada umumnya. Semoga ini dapat menjadi referensi percakapan dan diskusi lebih lanjut mengenai topik yang penulis pilih, terlepas dari setuju tidaknya pembaca perihal perspektif dan kesimpulan yang diambil penulis. Penulis sadar betul atas ketidaksempurnaan penelitian ini, oleh karenanya, kritik dan saran dari sidang pembaca sangat penulis harapkan. Terima kasih.

Bandung, 11 Juni 2017

Bajik Assora

Ucapan Terima Kasih

Tadinya penulis berharap bisa membuat sebuah ode/sastra/apapun itu demi mengisi ucapan terima kasih atas seluruh kehidupan yang penulis jalani di Bandung: kota kembang, *flower city*, kota hantu yang ramai karena penulis tidak pernah merasa familiar dengannya. Namun apa daya, *deadline* pengumpulan draft putih yang tinggal tiga hari rasanya tidak akan cukup menampung keinginan yang menumpuk di kepala.

Tujuh tahun! Bahkan penulis tidak percaya begitu lamanya 'musim panas' yang penulis jalani sebagai mahasiswa; tahu-tahu saja musim dingin kehidupan mulai tiba. Coba tanya apa yang penulis ingat selama masa hidup di Bandung; mungkin ia hanya terdiam saja, mencoba menyusun kembali memori yang sudah begitu padat dengan kapasitas otak yang demikian mengecil sejalan usia yang menginjak seperempat abad.

Maka itu penulis mencoba mengingat lagi siapa saja yang bertanggung jawab atas semua yang dialami. Rasanya hanya dengan itu penulis bisa mewakili rasa terima kasih untuk semua waktu yang ia lalui di alam kampus.

- **Bapak**, **Ibu**, serta seluruh penghuni rumah nomor 22 di Rasamala III Menteng Dalam, untuk semua dukungan, kepercayaan dan kehangatan pada anaknya. Maafkan untuk segala kegagalan dan kesalahan yang dilakukan di empat belas semester. Mungkin cuma skripsi ini yang bisa membayar semua waktu yang hilang.
- **Mas Nur**, pembimbing yang setia menolong penulis menghadapi segala masalah akademik yang dilaluinya. Terima kasih untuk semua obrolan pagi, sesi bimbingan dan kelas-kelas kuliah yang indah. Mungkin skripsi ini tidak akan selesai tanpa omongan anda.
- **Mba Arum**, kakak yang selalu mengingatkan penulis untuk menjadi dewasa, serta penyedia semua data dan kontak penting bagi skripsi ini. Tanpamu skripsi ini tidak akan ada.

- **Bang Atom** dan **Mas Adri**, untuk masukan saran dan kritik selama masa sidang. Semoga skripsi ini berguna kedepannya.
- **Pak Pius, Mba Silvi, Mas Pur, Mba Is**, **Mas Andre**, serta seluruh staf pengajar dan tata usaha FISIP Unpar yang pernah ditemui. Semoga tidak pernah lelah menghadapi mahasiswa-mahasiswa lainnya seperti penulis.
- **Hagi Adhityo** dan **Rinaldi Barita**, dua sahabat sejak SMP hingga sekarang, yang selalu menemani penulis dengan pillow-talk-nya yang hangat dan mesra. Semoga curhatan bromance kita terus berlanjut di waktu mendatang.
- **Media Parahyangan**. Apa yang akan penulis selalu anggap sebagai rumah dan kampus keduanya. Tempat penulis selalu hadir di waktu-waktu hampa, serta tempat bertualang mencari momen yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika TARDIS itu nyata, mungkin wujudnya adalah ruang sekre di pojok gedung UKM sana, dan nama-nama ini adalah aliennya:
    - **Eky Alkautsar**, teman dari awal semester, teman pertama di MP, sampai ngekos bareng, **Adytio 'dadas' Nugroho** si bocah skena indie bumi Pasundan (Djongdjonz a'), **Kania Mamonto**, teman dari pertama kali ikut misa di Bandung (sampai gak pernah misa bareng lagi), **Charlie Albajili** untuk semua support dan ide-idenya sebagai pemred, **Yusti Hasniyah** dan semua kecerewetannya selama di sekre, **Farida 'Ida' Sundari** dan suara cemprengnya yang dirindukan di sekre, **Rahajeng Anandari** untuk kesediaannya disuruh-suruh bikin surat dan proposal dadakan, **Sharina Savitri** yang selalu tabah mencari 'uang jajan' untuk MP. Terima kasih atas hura-huranya di setahun lebih membantu penulis mengurus sekre MP yang melelahkan dan menyenangkan.
    - Teman-teman MP lain yang pernah penulis akrabi kehadirannya: **Noorhan 'babeh' Pambudi** si guru olahraga anti-militerisme, **Blandina Lintang** untuk semua tawa sunyi dan ledakan emosinya, **Anugrah Wahyudi** yang beres jadi PU hilang begitu saja (dicarekeun ku barudak siah), **Shafira 'Pya' Ayunindya**, semoga makin mesra bersama Eky (ditunggu reuni Shafiky berikutnya!).

- Kawan-kawan MP lainnya yang pernah menghiasi kehidupan sekre: **Banyu**, **Harish 'Aish'**, **Janot**, **Mumut**, **Zhira**, **Astari**, **Yasmin**, **Uti**, **Dea**, **Meila**, **Osman**, **Marisa**, **Putu**. Semoga waktu-waktu kalian di MP selalu dikenang.
- Semua angkatan bawah MP, baik yang masih kuliah hingga yang lulus duluan: **Veronica 'Oni' Dwi Lestari**, **Kristiana Devina Herdianti, Axel 'alek' Gumilar**, **Rigina Handayani**, **Dyaning Pangestika**, **Zico Sitorus**, **Robby Hardiwinata**, **Vincent Fabian**, **Katya Prijanka**. Tetaplah bersenang-senang, selagi masih sempat!
- Seluruh kolega MP lainnya yang turut men-support MP dimasa keaktifan penulis: **Dendy Nugraha**, terima kasih untuk tumpangannya di Margahayu (Vila DDY jauh anjis), **Ferdi 'aceng' Arief**, **Adrian 'ebet'**, **Achmad 'jepe' Jauhar** si Liverpudlian chapter antapani (resep maneh terbukti, jep!), **Adimaz Fernando** (sweater maneh masih di urang ndo, punten), **Ananda Suryo**, **Eko Haridani**, **Adit Lagosse**, **Doni Marmer**, **Anisaa 'yona' Yovani**.

– **Koperasi Sorge** dan **Sorge Records**, tempat penulis belajar memahami dan membela nilai-nilai hidup, termasuk bersenang-senang dengannya. Terima kasih telah mengajarkan apa rasanya menjadi dewasa dan bandel secara bersamaan. **Budi Yoga Soebandi**, kawan, mentor, teman begadang. Untuk semua 'vantrend journey'-nya dan obrolan tengah malamnya, terima kasih. **Andremirza 'HALO ANDRE HALO' Fahmi** dan **Egi Primayogha Mardhika Sutamto**, duet Elug yang pertama kali mengajarkan penulis caranya menjadi nakal serta semua kufur nikmat kolesterol Gnibmag, terima kasih. Raden Mas Leonardo **Bramantya Basuki** atas segenap ilmunya dan motor astreanya (maaf kalau jadi sering bolak-balik bengkel). **Bimo Wicaksono** untuk waktu-waktu di 'Castle Black'-nya, salam sayang untuk BJK. **Lalola Easter** untuk kejutekannya yang menyegarkan. **Daywin Prayogo**, terima kasih untuk keriaan dan ide-idenya. **Fransiskus 'koh acis' Adi Pramono** dan kreasi-kreasi kebandelannya. **Ananda Wardhana Badudu** si gitaris tampan banyak fans tapi 'galau mulu lu anjis!', terima

kasih untuk pengalamannya di Banda Neira. **Devinisa ‘moli’ Suhartono**, terima kasih untuk semua curhatan tengah malamnya (dugem lagi yu), salam untuk Dilan dan Sherly. **Mufqi ‘uqi’ Hutomo**, untuk segenap ilmu yang penulis belum pernah dapat di tempat lain. **Rangga ‘bbbangkai’ Wiraspati** dan kegilaannya di setiap kehadirannya. **Ilham ‘aconk’ Pramadan**, om-om nuansa flamboyan Ujung Berung, sukses di kehidupan berkeluarganya. **Biondi ‘Bondi’ Nasution**, sosok abang yang selalu pengertian. **Adytia Afriandeni Eros** untuk semua ilmu per’skena’annya di records. **Adhito Harinugroho** dan bentuk-bentuk kebengalan yang belum pernah ditemukan penulis. Serta nama-nama lain yang turut hadir di setiap kesempatan perjumpaan di Sorge. Terima kasih!

- **Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa** (KKBM) Unpar. Tempat yang sederhana namun begitu hangat dan bersahaja di kolong langit Ciumbuleuit. Tempat dimana sesanti Unpar justru paling dirasakan kehadirannya. **Angga ‘Cibiru Boyz’** si ketua (kamu pasti bisa), **Andrian ‘swag’**, **Cindy**, **Diko ‘pak bachtiar’**, **Wagiman** yang selalu sabar menghadapi tingkah laku anak KKBM dan email pesanan CD Baneir, **Marsidan ‘mas jidan’** yang selalu rela diutangin, **Teh Sopi**, **Yudi Nugraha**, **Suyitno** dan **Andri** fotokopi. Terima kasih untuk setiap momen bersahabatnya.
- Para pejuang terakhir HI 2010: **Paulus**, **Faza**, **Fajar gendut**, **Didit**, **Satria**, **Albert Munaba**, **Pandya**.
- Segenap teman-teman di Sekolah Santo Fransiskus Asisi: **Raras**, **George ‘bejo’**, **Adel**, **Nicho**, **Marina**, **Samuel**, **Tyo**, **Suluh**, **Gabby**, **Rastha**, **Febe**, **Riri**. Kapan reunian?
- Seluruh teman-teman SMA: **Reksa**, **Arif Yudharisna**, **Alam**, **Wendi**, **Doyo**, **Yudha** ‘**bolang’**, **Kamal ‘otoy gede’**, **Fadhilah ‘otoy gigi’**, **Hasan**. Semoga kumpul-kumpul lagi.
- Kawan-kawan Bukit Jarian Dalam 39: **Eva**, **Joseph**, **Minggus**, **Mba Lucy**, **Jason**. Terima kasih untuk dua tahun yang menyenangkan.
- Mike Kinsella, Daniel Johnston, Jeff Buckley, Nick Drake, Andrew Bird, untuk menginspirasi penulis di masa kegundahannya.

- Semua film, album, komik dan serial yang menemani pengerjaan skripsi ini.
- God, Tuhan, Allah, Gusti nu Agung, untuk semua transcendental support-Nya.

Bandung, 10 Agustus 2017

Bajik Assora

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup merupakan topik yang dalam beberapa dekade terakhir mendapat perhatian khusus, terkait dengan munculnya segenap persoalan baru dalam lingkungan hidup sebagai efek pertumbuhan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah *unsustainable development* dan pembangunan yang tidak berwawasan jangka panjang, antara lain deforestasi atau penggundulan hutan. Transformasi lahan hutan oleh tindakan manusia merupakan salah satu kekuatan besar dalam perubahan lingkungan global dan salah satu penggerak besar hilangnya keanekaragaman hayati. World Resources Institute memperkirakan bahwa hanya sekitar 22% dari tutupan hutan asli di dunia tetap "utuh", dimana sebagian besarnya berada di tiga daerah yang luas: hutan Kanada dan hutan boreal Alaska, hutan boreal Rusia, serta hutan tropis yang membentang dari barat laut Amazon hingga Perisai Guyana (Guyana, Suriname, Venezuela, Kolombia, dll)[1]. Dalam laporan penelitian keempat The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), diestimasikan bahwa sektor kehutanan berkontribusi 17,4% dari semua gas rumah kaca bersumber antropogenik, dimana mayoritas dikarenakan penggundulan hutan dan degradasi

[1]"Global Deforestasion", diakses di http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/deforest/deforest.html, pada 10 Oktober 2014.

hutan[2]. Lebih jauh lagi, The Stern Review on the economics of climate change mengamati bahwa "*curbing deforestation is a highly cost-effective way of reducing greenhouse gas emissions*"[3]. Berdasarkan bukti ilmiah tersebut, peran kehutanan dalam perubahan iklim diangkat dalam sesi ketiga belas dari Conference of Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-13) yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada Desember 2007[4]. The Bali Action Plan, yang menguraikan bentuk kerjasama jangka panjang hingga tahun 2012 dan seterusnya, meminta adanya peningkatan aksi nasional dan internasional, termasuk: "*Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries*".

Hutan tropis pernah mengokupasi hingga 16 juta kilometer persegi di dunia, namun saat ini hanya sekitar 8-9 juta kilometer persegi yang tersisa. Diperkirakan bahwa Amerika Latin dan Asia telah kehilangan 40% hutan asli mereka. Di banyak negara berkembang, laju deforestasi tergolong lebih cepat dibanding negara lain. Sebagai contoh, sebagian besar kawasan hutan dari Bangladesh, India, Filipina, Sri Lanka dan bagian dari hutan hujan Brasil diperkirakan akan punah pada akhir abad ini.[5]

---

[2] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. *Climate change 2007: synthesis report*. IPCC fourth assessment report. Geneva, Switzerland.

[3] Stern, N. 2007. *Stern Review: The economics of climate change*. London, UK, H.M. Treasury.

[4] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2007. *Report of the Conference of Parties on its thirteenth session*, Bali, Indonesia, 3–15 December 2007. Geneva, Switzerland, UN.

[5] "Global Deforestation", diakses di http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/deforest/deforest.html, pada 10 Oktober 2014.

Salah satu yang mendapat perhatian terkait laju deforestasi di dunia adalah hutan Borneo. Di kawasan pulau yang diokupasi tiga negara sekaligus, permasalahan pengurangan hutan justru meningkat seiring berkembangnya tingkat perekonomian di Kalimantan, terutama bagi Indonesia dan Malaysia. Berbagai alasan melatarbelakangi fenomena deforestasi pulau Borneo, mayoritas dikarenakan konversi lahan untuk kepentingan komersil, terutama pertanian. Pesatnya bisnis kelapa sawit yang melanda Malaysia dan Indonesia sejak dekade 1980an membuat lahan hutan di Kalimantan mulai ditebangi dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Hal lebih kompleks terjadi di Indonesia, dimana kebijakan transmigrasi guna mengatasi sentralisasi populasi penduduk sejak era Orde Baru menghadirkan masalah baru dimana lahan hutan yang ada ikut mengalami konversi untuk kebutuhan kaum transmigran.

Menanggapi permasalahan yang terjadi diatas, ketiga negara yang menduduki pulau Borneo sepakat membuat inisiatif untuk menanggulangi akibat dari deforestasi yang telah melanda Borneo selama puluhan tahun. Diawali oleh WWF Sundaland Bioregion Indonesia pada tahun 2001 dengan proposal berjudul ‘Borneo Mountain Forest’ sebagai kelanjutan proyek ITTO Indonesia dan Malaysia: Konservasi Lintas Batas, dibukalah pertemuan para *stakeholder* pemerintah bulan April 2005 di Brunei Darussalam, dimana tema “*Three Countries – One Conservation Vision*” disetujui.[6] Setelah segenap pertemuan lanjutan ang berlangsung periode akhir tahun 2005 hingga awal tahun 2007, pemerintah ketiga negara akhirnya sepakat mendeklarasikan komitmen mereka untuk mengelola secara berkelanjutan dan

[6] http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-on-track, diakses pada 10 Oktober 2014.

melindungi kawasan pulau Borneo. Deklarasi Heart of Borneo ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Minister of Natural Resources and Environment-Malaysia, dan Minister of Industry and Primary Resources Brunei Darussalam di Bali, Indonesia. Deklarasi tersebut secara sahih juga melahirkan Heart of Borneo Initiative yang difasilitasi oleh World Wild Fund for Nature (WWF) yang juga bertindak sebagai operator program kerja yang disiapkan oleh negara anggota.[7] Visi yang ingin dicapai oleh Heart of Borneo Initiative adalah terwujudnya pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator Heart of Borneo yang meliputi 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan alam, melalui kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan.[8]

Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan ketertarikannya untuk menganalisis bentuk-bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Heart of Borneo Initiative dalam penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan selama enam tahun pasca-pendiriannya. Karenanya, judul yang ditetapkan oleh penulis adalah **Upaya WWF Indonesia Dalam Menanggulangi Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative Tahun 2007-2013.**

---

[7] Loc.Cit.

[8] http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-vision, diakses pada 10 Oktober 2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Kalimantan, pulau yang dengan cakupan area seluas 748,168 kilometer persegi menempatkannya sebagai pulau terbesar ketiga di dunia dibawah Greenland dan New Guinea, secara teritori terbagi kedalam tiga negara, antara lain Indonesia dengan cakupan teritori mencapai 72,6%, lebih besar dari cakupan teritori Malaysia dan Brunei Darussalam yang sebesar 26, 7% dan 0,6%[9]. Secara geografik, pulau yang secara internasional disebut sebagai Borneo itu terbagi menjadi dataran tinggi rendah yang secara diagonal memanjang dari negara bagian Sabah (Malaysia) di timur laut Borneo hingga daerah barat daya, yang secara kasar membentuk batas antara provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Indonesia. Dataran tinggi ini tidak bersifat vulkanis, dimana hanya terdapat satu gunung berapi yang telah mati namun merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara, yakni Gunung Kinabalu di Sabah, dengan ketinggian mencapai 4.095 meter[10].

Kalimantan dulunya dipenuhi oleh hutan hujan yang lebat. Dengan daerah pesisir rawa-rawa yang dibatasi oleh hutan bakau dan daerah bergunung-gunung, kebanyakan dari wilayah tersebut tampak tak mungkin dilewati dan dieksplorasi. Berdasarkan laporan WWF, hutan-hutan di Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati paling banyak di dunia, dimana setidaknya terdapat 222 spesies mamalia (44 darinya khas), 420 burung yang menetap (37 khas), 100 amphibi, 394 ikan (19

---

[9] "Islands By Land Area". Diakses di http://islands.unep.ch/Tiarea.htm, pada 10 Oktober 2014.
[10] “Borneo’s Geography”. Diakses di http://www.mongabay.com/borneo.html, pada 10 Oktober 2014.

khas), dan 15.000 tumbuhan (6.000 khas) -- lebih dari 400 dari yang telah ditemukan sejak tahun 1994[11].

Gambar 1.1: *Major vegetation types of Borneo*[12]

Selain keanekaragaman hayati, Borneo juga menjadi tempat tinggal utama suku adat pribumi Dayak yang hingga tahun 2005 diperkirakan berjumlah sebanyak empat juta jiwa[13] dan terbagi kedalam tujuh sub-adat. Sub-adat tersebut antara lain Dayak Iban, Dayak Bidayuh, Dayak Kayan-Kenyah, Dayak Maloh, Dayak Barito,

---

[11] WWF Germany, *Borneo: Treasure Island at Risk*, June 2005, hal. 8.

[12] Langner A. and Siegert F.: *Assessment of Rainforest Ecosystems in Borneo using MODIS satellite imagery*, June 2005.

[13] Djuweng S.: Are *the Dayak on the Way to Extinction?* ; dimuat di harian The Jakarta Post, 10 Oktober 1997.

Dayak Kelabit-Lun Bawang dan Dayak Dusun-Kadazan-Murut.[14] Kesemua sub-adat tersebut masih terbagi kedalam ratusan grup etnik dimana masing-masing memiliki budaya, pola sosial dan bahasa yang berbeda-beda.

Selama ribuan tahun, berbagai spesies fauna dan flora serta masyarakat adat Dayak menggantungkan Hutan Hujan Borneo sebagai sarana keberlangsungan hidup. Namun sejak tahun 1980an dan 1990an, Borneo mengalami transisi yang mengejutkan. Hutan-hutan yang sebelumnya mendominasi wilayah daratan hingga 75% pada pertengahan 1980an[15] ditebangi hingga tahap yang tak pernah terjadi di sejarah manusia. Pohon-pohon di Hutan hujan Borneo berpindah ke negara-negara industri seperti Jepang dan Amerika Serikat dalam bentuk mebel, bubur kertas, dan sumpit. Awalnya, kebanyakan dari kayu tersebut diambil dari utara pulau bagian Malaysia kota Sabah dan Sarawak. Kemudian, penebangan hutan meluas di bagian selatan Kalimantan guna menjadi sumber utama kayu tropis. Keadaan hutan-hutan yang ada di Borneo saat ini sangat terancam dengan meningkatnya pasar biofuel, terutama kelapa sawit.

Dekade 1980 dan 1990 merupakan tahun-tahun terburuk terkait deforestasi di Borneo, dimana sebanyak 60 hingga 240 meter kubik kayu dipanen per hektarnya, dibandingkan dengan 23 meter kubik per hektar di hutan hujan Amazon, Amerika Selatan[16]. Tren pembukaan lahan di daerah dengan tingkat populasi rendah sendiri telah dimulai sejak era 1970an ketika pemerintah Indonesia memulai kebijakan transmigrasi kepada petani yang miskin dan tidak memiliki lahan cocok tanam

---

[14] Payne J., Cubitt G., Lau D. and Langub J.: *This is Borneo*; New Holland, 2001
[15] WWF Germany, Op.cit., 6.
[16] "Penebangan Dan Transmigrasi". Diakses di http://world.mongabay.com/indonesian/borneo.html, pada 10 Oktober 2014.

secara masif, untuk menanggulangi ledakan penduduk di pulau Jawa. Demi kebijakan transmigrasi yang diarahkan ke wilayah dengan tingkat populasi rendah seperti Kalimantan, dimulailah proses penebangan hutan secara sistematis unuk menyediakan akses yang dapat memfasiliasi penyelesaian yang bersifat spontan, seperti penggunaan jalur penebangan untuk menggantikan sungai sebagai akses utama menuju area terpencil. Dalam periode tersebut, transmigrasi telah menjadi andalan utama untuk memajukan daerah Kalimantan secara lebih luas. Konsep ini bukanlah sebuah konsep baru, karena pembukaan lahan untuk kepentingan pertanian telah dilakukan sejak era kolonial dimana lahan-lahan perkebunan karet menggunakan tenaga buruh yang dibawa dari Jawa. Namun, sejak awal 1900an, pemerintah menjadikan transmigrasi sebagai kebijakan yang dikhususkan[17].

Tingkat transmigrasi mencapai titik puncaknya pada pertengahan 1980an, walaupun masih diragukan apakah hal tersebut menjadi alasan utama deforestasi. Perambahan lahan oleh petani-petani pionir di sepanjang batas hutan terus meningkat dikarenakan pertambahan penduduk dan peningkatan mobilitas masyarakat. Terhitung sejak dimulainya program transmigrasi oleh pemerintahan presiden Soeharto tahun 1966-1967, hingga tahun 1998 sebanyak 300.000 hektar hutan Kalimantan telah mengalami alih fungsi.[18]

[17] WWF Germany, Op.cit., 37.

[18] Global Forest Watch, Global Forest Watch Indonesia, World Resources Institute: *The State of the Forest, Indonesia*, f2002

Tabel 1.1: Alokasi dan Penanaman Hutan Tanaman Industri di Indonesia Hingga Desember 2000[19]

Province	HTI Area Allocated (ha)	HTI Area Planted (ha)	% of allocated Area planted
HTI-Pulp			
W. Kalimantan	735,306	42,785	5.8
C. Kalimantan	185,511	0	0
S. Kalimantan	268,585	86,259	32.1
E. Kalimantan	793,237	325,517	41.0
Total	**1,982,638**	**454,561**	**22.3**
HTI-Sawn			
W. Kalimantan	152,780	45,497	29.8
C. Kalimantan	79,000	5,000	6.3
S. Kalimantan	77,575	26,608	34.3
E. Kalimantan	439,719	105,020	23.9
Total	**749,074**	**182,125**	**24.3**
HTI-Trans			
W. Kalimantan	217,930	33,698	15.5
C. Kalimantan	132,495	61,625	46.5
S. Kalimantan	41,040	20,943	51.0
E. Kalimantan	183,989	75,934	41.3
Total	**575,454**	**192,200**	**33.3**
Grand Total	**3,307,257**	**828,886**	**25.1**

Jika ditilik berdasarkan tabel yang tertera diatas, terihat bahwa permasalahan konversi lahan di Kalimantan juga tidak terlepas dari tindakan over-logging yang mengakibatkan krisis kayu. Fenomena yang dimulai sejak pertengahan 1980an di pulau Sumatra dan juga terjadi di Kalimantan pada 1990 itu mengakibatkan pemerintah membuat sistem dengan tiga tipe perkebunan kayu industri: Hutan

[19] Ibid.

Tanaman Industri (HTI) pertukangan untuk kayu gelondongan, HTI kayu energi untuk industri kayu bakar dan arang, serta HTI kayu serat untuk inudstri bubur kertas dan kertas.[20] Namun pembagian sistem tersebut tidak mampu mereduksi permasalahan lebih lanjut, yaitu kurangnya pengawasan dan perawatan lahan HTI lebih lanjut, terutama pengadaan reboisasi – penanaman ulang lahan hutan yang telah ditebang – mengakibatkan tekanan tambahan pada hutan yang terpencil. Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan di tahun 2002, dari sebanyak 3,3 juta hektar lahan hutan yang dialokasikan ke HTI, hanya 829.000 hektar atau sekitar 25% lahan yang telah ditanami ulang hingga akhir tahun 2000.[21]

[20] World Rainforest Movement: *Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation: Asia*, http://www.wrm. org.uy/deforestation/Asia/Indonesia.html , diakses pada 10 Oktober 2014.
[21] Global Forest Watch, Global Forest Watch Indonesia, World Resources Institute: *The State of the Forest, Indonesia*, 2002

Di waktu yang sama, pemerintah juga memperkenalkan kebijakannya untuk mempromosikan diversifikasi komoditi non-migas, diluar minyak bumi dan gas alam. Dari komoditi non-migas tersebut, kelapa sawit menjadi produk utama yang dikembangkan di Borneo.

Tabel 1.2: Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit (ha):[22][23]

Province	Oil Palm Area 1984	Oil Palm Area 1998	Oil Palm Area 2003	Growth (1998-2003)	Avg. Annual growth (1998-2003)
W. Kalimantan	13,044	279,535	415,820	48.8%	8.3 %
C. Kalimantan	53	110,376	222,034	101%	15.0 %
S. Kalimantan	0	93,902	139,634	48.7%	8.3 %
E. Kalimantan	44	78,938	192,146	143%	19.5 %
Tot. Kalimantan	**13,140**	**562,751**	**969,634**	**72.3%**	**11.5 %**
Sabah	160,507	842,496	1,135,100	34.7%	6.1 %
Sarawak	26,237	248,430	464,774	87.1%	13.3 %
Tot. Borneo Mal.	**186,744**	**1,090,926**	**1,599,874**	**46.7%**	**7.9%**
Borneo Grand Total	**199,884**	**1,653,671**	**2,569,508**	**55.4%**	**9.2%**

Perkebunan kelapa sawit telah mendominasi area terluas di Borneo. Keaktifan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mendorong persiapan lahan menjadi salah satu alasannya. Tanaman yang awalnya tumbuh di Afrika dan mulai

[22] Sumber data Kalimantan: The World Bank: *Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition*, Februari 2001; dan Rangkuman Laporan Pertama WWF-Indonesia Terkait Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat (ditulis oleh Fitrian Ardiansyah dan Purwo Susanto, WWF Indonesia, Maret 2005, laporan Internal WWF).
[23] Sumber data Malaysia: Malaysian Oil Palm Statistics 2003. Economics & Industry Development Dvision Malaysian Palm Oil Board http://161.142.157.2/home2/home/stac03_area1.htm, diakses pada 10 Oktober 2014.

dikembangbiakkan di Indonesia pada tahun 1848 ini secara ideal dihabitatkan di wilayah tropis dari garis khatulistiwa ke 12 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan, dimana curah hujan per tahun berada diantara 2.000 dan 2.500 milimeter[24]. Walaupun memiliki sejarah singkat sebagai tanaman komersil, perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak buruk bagi kondisi di pulau Borneo.

Hingga saat ini, produsen kelapa sawit terbesar di dunia masih dipegang oleh Malaysia, dimana total luas area perkebunan meningkat dari 60.000 hektar di tahun 1960an menjadi 3 juta hektar pada tahun 2001. 30% dari area perkebunan ini berada di Sabah sedangkan 13% lainnya berada di Sarawak. Mengingat bagaimana mayoritas area cocok tanam di Semenanjung Malaysia telah digunakan, ekspansi lahan mulai terjadi di wilayah Borneo utara, serta, dalam tingkat yang lebih besar, di Kalimantan. Penanaman kelapa sawit telah meningkat dari 186.774 hektar di Sabah dan Sarawak pada 1984 menjadi 1.673.721 hektar pada akhir 2003.[25] Adapun perluasan lahan kelapa sawit di Indonesia tergolong lebih cepat, yakni dari 13.140 hektar di tahun 1984 hingga mencapai 969.634 hektar di akhir 2003.[26]

---

[24] Okamoto S.: *The Growth of Oil Palm Plantations and Forest Destruction in Indonesia*; Japan NGO Network on Indonesia (JANNI), nirtanggal.

[25] Jan Marteen Dros: *Accommodating Growth: Two scenarios for oil palm production growth*; Advice and Research for Development and Environment, 2003

[26] “Kelapa Sawit”. Diakses di http://world.mongabay.com/indonesian/borneo.html, pada 10 Oktober 2014.
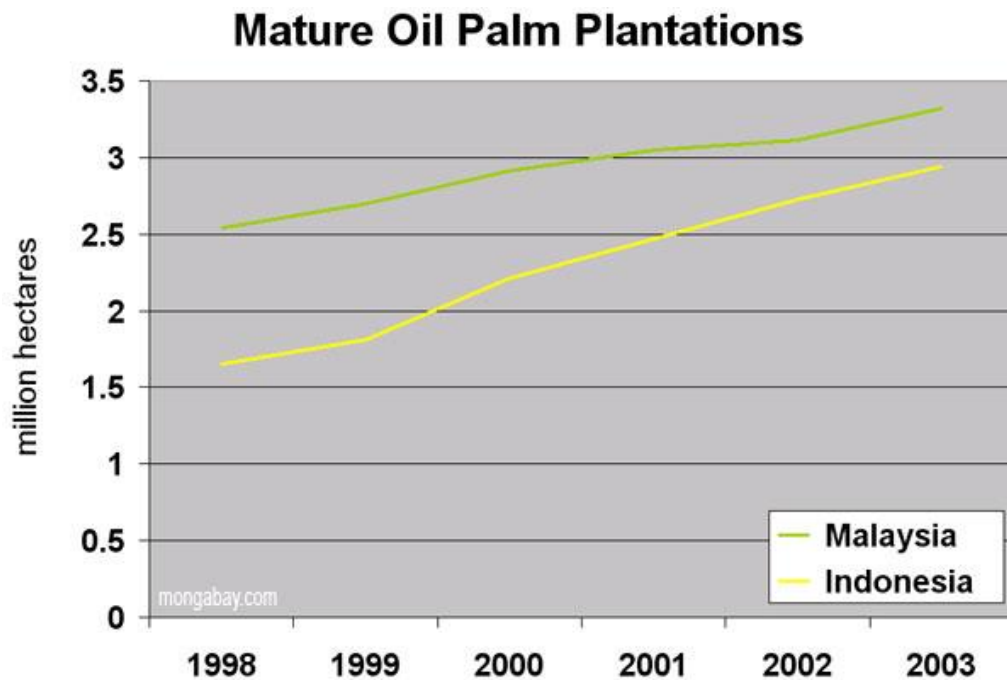
Gambar 1.2: Pertumbuhan luas area perkebunan kelapa sawit 1998-2003[27]

Berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Indonesia mengalami kerusakan terbesar hutan dari negara manapun di kawasan Asia Pasifik. The World Bank telah memprediksi bahwa tidak akan ada lagi hutan hujan yang tersisa di Kalimantan diluar kawasan hutan lindung mulai 2010 bila tingkat kerusakan saat ini terus berlanjut.[28] Deforestasi secara jelas menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup ekosistem hutan beserta penghuninya, namun lebih sulit untuk menilai Faktor-faktor yang bertanggungjawab atas perusakan habitat tertentu. Masing-masing faktor memiliki keterkaitan satu sama lain dalam proses

[27] Loc.cit.

[28] The World Bank: *Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition*, February 2001

peningkatan deforestasi di Kalimantan, seperti pembangunan jalan, pembalakan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan, transmigrasi, hingga kebakaran hutan. Sebelumnya, pemerintah cenderung menyalahkan deforestasi pada “peladang berpindah” (*shifting cultivators)*, namun pengembangan komersial, terutama perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk mempercepat deforesasi pada 1990-an. Praktik kehutanan oleh pemegang konsesi (HTI) mengalami kegagalan besar dari tujuan pengelolaan hutan produksi lestari. Penebangan liar dan produksi bubur kertas diperkirakan mencapai tiga kali hasil panen resmi pada tahun 1998, dan itu mempengaruhi kondisi hutan lindung, taman nasional serta hutan produksi. Dapat dikatakan, empat faktor utama yang saling terkait yang menimbulkan ancaman bagi hutan Borneo dan spesies didalamnya antara lain: (1) Konversi penggunaan lahan, (2) pembalakan liar, (3) pengelolaan hutan yang buruk, serta (4) kebakaran hutan.

Tabel 1.3: Tingkat Deforestasi Hutan Kalimantan (ha).[29]

Province	Total Land Area	RePPProT (1985)[296]		MoF (1991)[297]		MoF (1997)[298]		Landsat (2000)[299]		MODIS(2002)[300]	
		Forested	%	Forested	%	Forested	%	Forested	%	Forested	%
W. Kalimantan	14,546,318	8,700,600	59.8	8,117,980	55.8	6,713,026	46.1	6,736,261	46.3	-	
C. Kalimantan	15,249,222	11,614,400	76.2	11,492,050	75.4	9,900,000	64.9	9,320,771	61.1	-	
S. Kalimantan	3,703,550	1,795,900	48.5	1,749,360	47.2	999,182	27.0	647,612	17.5	-	
E. Kalimantan	19,504,912	17,875,100	91.6	17,584,260	90.2	13,900,000	71.3	12,477,309	64.0	-	
Total	**53,004,002**	**39,986,000**	**75.4**	**38,943,650**	**73.5**	**31,512,208**	**59.5**	**29,181,953**	**55.1**	**26,700,000**	**50.4**

Tabel yang tertera diatas dapat memperlihatkan garis besar akibat dari deforestasi yang melanda pulau Kalimantan. Akibat tersebut termasuk berada dalam taraf bahaya. Antara tahun 1985 dan 2002 Kalimantan telah kehilangan sebanyak lebih dari 13 juta hektare hutan, atau setara dengan tiga kali ukuran negara Swiss. Tingkat deforestasi tahunan di Kalimantan antara tahun 1985 dan 1997 adalah sekitar tiga kali lebih besar dari angka yang dilaporkan Asia Tenggara secara keseluruhan.[30] Pada tahun 1985 area hutan masih menutupi sebanyak tiga perempat dari kawasan daratan kalimantan, tetapi jumlah ini turun menjadi hanya lebih dari 50% pada tahun 2002. Dalam 17 tahun, kalimantan telah kehilangan 34% dari hutan.

[29] WWF Germany, Op.cit., 69.

[30] Fuller D.O, Jessup T.C and Salim, A.: *Loss of Forest Cover in Kalimantan, Indonesia, since the 1997-1998 El Niño*. Conservation Biology, pp.249-254 Volume 18, No1, February 2004

Menanggapi berbagai ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup di pulau Kalimantan, pada tahun 2001 WWF Sundaland Bioregion Indonesia menginisiasi program Heart of Borneo disingkat HoB. Program ini awalnya dimunculkan dalam basis proposal berjudul Borneo Mountain Forest. Proposal Borneo Mountain Forest merupakan lanjutan dari proyek "Konservasi Lintas Batas" dari International Tropical Timber Organization (ITTO) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia di kawasan hutan Borneo. Proyek "Konservasi Lintas Batas" ini menetapkan Taman nasional Kayan Mentarang dan Betung Kerihun di Indonesia serta Lanjak Entimau dan Pulung Tao di Malaysia sebagai uji coba konservasi di kawasan perbatasan.[31] Menyusul disetujuinya proposal Borneo Mountain Forest oleh beberapa donor, 'kick off meeting' Heart of Borneo dilakukan pada 2003 yang merupakan kerjasama Departemen Kehutanan Pemerintah Indonesia dengan WWF Indonesia. Setelah itu, total sebanyak tiga pertemuan multilateral antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam rentang waktu April 2005 hingga November 2006, termasuk pelaksanaan lokakarya tingkat provinsi (Kalimantan barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) serta lokakarya nasional Heart of Borneo di Jakarta pada Desember 2005.[32] Titik puncaknya adalah tercapainya kesepakatan mendeklarasikan komitmen semua negara untuk mengelola secara berkelanjutan dan melindungi kawasan Heart of Borneo. Deklarasi HoB ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Minister of Natural Resources and

[31] http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-on-track, diakses pada 10 Oktober 2014.
[32] Loc.Cit.

Environment -Malaysia, dan Minister of Industry and Primary Resources–Brunei Darussalam di Bali, Indonesia pada tanggal 12 Februari 2007.[33]

Tujuan pengelolaan kawasan Heart of Borneo adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di jejaring kawasan konservasi, kawasan lindung serta hutan produksi dan penggunaan lahan lainnya;
2. Terwujudnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung pengelolaan kawasan HoB secara berkelanjutan dengan memperhatikan perjanjian multilateral dan bilateral yang ada;
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis kaidah-kaidah ilmiah dan kearifan lokal bagi peningkatan kesejahteraaan masyarakat melalui penerapan pengelolaan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan pelatihan, maupun kegiatan lainnya yang relevan dengan pengelolaan lintas batas, konservasi dan pengembangan wilayah di kawasan HoB.[34]

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan, penulis memfokuskan diri pada upaya – upaya WWF Indonesia melalui kerangka kerja Heart of Borneo Initiative dalam penanggulangan masalah deforestasi yang terjadi di pulau Kalimantan. Penulis mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pihak WWF Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2013.

---

[33] Loc.Cit.

[34] http://heartofborneo.or.id/id/about/understanding-heart-of-borneo, diakses pada 10 Oktober 2014.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menjawab pertanyaan, Apa upaya WWF Indonesia melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo Initiative dalam menanggulangi deforestasi di pulau Kalimantan?

1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam upaya penulis memperdalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap jurnal laporan yang berudul "*Borneo: Treasure Island at Risk - Status of Forest, Wildlife and related Threats on the Island of Borneo*" yang ditulis secara kolektif oleh Mario Rautner, Martin Hardiono dan Raymond J. Alfred dan diterbitkan oleh WWF International tahun 2005. Dalam laporan tersebut dijelaskan fakta-fakta keseluruhan terkait kondisi lingkungan hidup di pulau Kalimantan - termasuk didalamnya kondisi hutan tropis, ekosistem masyarakat asli Kalimantan serta kekayaan sumber daya alam Kalimantan, serta fenomena deforestasi dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup di Kalimantan.

Selain itu, penulis juga menggunakan buku "Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia" karangan Mansour Fakih sebagai referensi dalam menjelaskan organisasi non-pemerintah sebagai aktor penghubung negara dan masyarakat hingga antar-negara sendiri.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan upaya WWF Indonesia melalui kerangka kerja Heart of Borneo Initiative dalam menanggulangi deforestasi di pulau Kalimantan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah agar dapat menjadi bahan referensi terkait fenomena deforestasi di pulau Kalimantan serta dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup secara keseluruhan di Indonesia. Selain itu, penulis berharap penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan bagi pembaca maupun penulis berikutnya yang ingin mengenal dan memperdalam studi terkait WWF Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan deforestasi melalui HoB Initiative.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam bukunya "*Essential of International Relations*", Karen Mingst berpandangan bahwa *International Relations is the study of interactions among the various actors that participate in international politics, including states, international organizations, non governmental organizations, sub national entities like bureaucracies and local government, and individual.*[35] Apa yang disampaikan

[35]Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, New York: W.W. Norton & Company, 1999, hal. 2.

oleh Mingst dalam mendefinisikan Hubungan Internasional mewakili pandangan salah satu paradigma besar dalam studi Hubungan Internasional, yakni Pluralisme. Pluralisme, sebagaimana dinyatakan oleh Viotti dan Kaupi dalam *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, 1990[36], memandang bahwa aktor internasional non negara adalah pemain penting yang tidak bisa dielakan signifikansinya dalam fenomena Hubungan Internasional. Pandangan bahwa para aktor non negara adalah entitas penting (*Important entities*) dalam hubungan internasional merupakan asumsi pertama dari empat asumsi pluralisme. Asumsi kedua adalah negara bukanlah aktor satu-satunya dalam hubungan internasional. Pluralisme menolak klaim pandangan realism yang menyatakan bahwa negara atau *state* merupakan *unitary actor of international relations*. Ketiga, Pluralisme juga meragukan klaim pandangan Realis yang menyatakan bahwa negara adalah aktor yang rasional. Pandangan pluralisme melihat bahwa kebijakan negara merupakan sebuah kebijakan yang dibentuk dari hasil atau proses pertarungan, negosiasi dan kompromi antar banyak aktor baik di dalam negara maupun di luar negara yang saling mempengaruhi. Asumsi keempat adalah bahwa pluralisme mengagendakan perluasan tematik politik internasional untuk tidak hanya fokus atau didominasi oleh pada apa yang disebut sebagai '*High Politics*' seperti isu-isu keamanan dan militer. Politik internasional harus pula memfokuskan diri pada isu-isu penting lainnya seperti ekonomi, sosial dan kesejahteraan serta isu-isu lainnya yang memiliki makna penting bagi setiap aktor hubungan internasional.

---

[36]Paul Vioti and Mark Kaupi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*.,Maxwel Macmillan International Editions,1990, hal. 7 dan 8.

NGO, atau *Non Government Organization* - dalam hal ini adalah *International NGO* adalah salah satu aktor non-negara yang tidak bisa dielakkan memainkan peranan penting dalam fenomena hubungan internasional. Peranan NGO yang dalam bahasa Indonesia kerap disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, setidaknya dapat dibagi kedalam 3 peranan (Fakih, 1996) yakni, *pertama* NGO karitatif, yakni NGO yang berperan memberikan bantuan langsung apakah dalam bentuk bantuan dana. Bahan-bahan tertentu seperti bahan pangan, papan, sandang dan obat-obatan dan bantuan kemanusiaan, keahlian, teknologi serta bantuan lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan biasanya berjangka pendek dan insidental. Kedua adalah NGO *Policies Advocacy* atau advokasi kebijakan, dimana NGO tersebut terlibat dalam upaya-upaya memberikan bantuan konsultansi, perumusan, perencanaan dan pengawasan kebijakan publik suatu negara. Dan yang ketiga adalah NGO Transformatif yakni NGO yang bertujuan untuk melakukan perubahan masyarakat demi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan umum dari masyarakat tersebut dan merupakan bagian dari alat perjuangan intelektual organik dari masyarakat yang tertindas[37].

Para ahli kebanyakan mengindentifikasi NGO sebagai lembaga yang menfokuskan diri kepada upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan; isu-isu yang tertentu dari Pembangunan (*Development*). Hal ini dikarenakan begitu luasnya definisi tentang *development* itu sendiri yang dapat meliputi pembangunan ekonomi, infrastruktur hingga asepek-aspek kebudayaan. Definisi pembangunan

[37]Lebih jauh tentang LSM, Mansur Fakih, Masyarakat Sipil dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 1996.

tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan tanpa henti. Dalam sebuah tulisan berjudul *Non-Governmental Organizations, business, and the management of ambiguity*, David Lewis menyatakan NGO lebih sering diidentikkan dengan organisasi yang memiliki perhatian utama pada masalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.[38]

Teori Pluralisme ini kemudian dapat digunakan dalam menjelaskan peran WWF Indonesia sebagai organisasi non-negara dalam upaya penangggulangan deforestasi yang terjadi di pulau Kalimantan, dengan melalui kerangka kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative. Pelibatan ketiga negara yang mengokupasi pulau Kalimantan dalam pembuatan inisiatif HoB menjelaskan peranan NGO sebagai *Policies Advocacy* atau advokasi kebijakan, dimana WWF Indonesia terlibat dalam upaya-upaya memberikan bantuan konsultansi, perumusan, perencanaan dan pengawasan dari inisiatif HoB yang turut melibatkan tiga negara.

Permasalahan lingkungan hidup belum pernah menjadi perhatian pusat dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional (HI), yang secara tradisional terfokus pada isu '*high politics'* seperti keamanan dan *interstate conflict*. Namun, eskalasi permasalahan ekologi lintas batas sejak tahun 1970an dan seterusnya menguatkan sub-par ilmu HI yang secara spesifik berkonsentrasi dalam kerjasama lingkungan hidup internasional. Pemikiran ini tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global dan interdependensi lingkungan hidup serta bertambahnya permasalahan lingkungan hidup global, seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan

---

[38] Lewis, David.,*Nongovernmental organizations, business, and the management of ambiguitydalam Mark E. Hager (editor), Nonprofit Management and Leadership*, 2003. Hal. 9.

pengurangan kekayaan sumber daya alam bumi.[39] Isu lingkungan global meningkat dikarenakan beberapa alasan, antara lain: (1) realita bahwa masalah lingkungan global yang dihadapi manusia hanya dapat dikelola secara efektif dengan bekerjasama antara semua pihak dan aktor HI, termasuk negara; (2) meningkatnya skala permasalahan lingkungan dari domestik ke tingkat regional, seperti deforestasi, degradasi hutan, kelangkaaan air, atau kebakaran hutan; (3) adanya hubungan kompleks antara permasalahan lingkungan dengan perekonomian dunia yang mengglobal.[40] Pemikiran tersebut lahir di dekade 1960an dalam pergerakan environmentalis modern yang mengkritik 'efek samping' ledakan pertumbuhan ekonomi pada bidang lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi cepat, perkembangan teknologi serta pertumbuhan jumlah penduduk dalam periode tersebut mengakibatkan bertambahnya kebutuhan energi dan sumber daya, bertambahnya sumber polusi serta berkurangnya sumber hayati bumi. Laporan United Nations Environment Program's Millenium Ecosystem Assessment (UNEP MEA) yang dirilis Maret 2005 menemukan bahwa sekurang-kurangnya 60% ekosistem yang menopang kehidupan di bumi mengalami proses degradasi atau digunakan secara tidak berkelanjutan.[41]

Lahirnya green theory tidak lepas dari green political theory, sebuah teori politik yang menjadi kritik atas dua paham politik dominan, Kapitalisme Barat dan Komunisme Soviet: dua paham yang walaupun berbeda pandangan terkait konsep

---

[39] Eckersley, Robyn, 2001. *Green Theory*, dalam Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith: *International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2nd Edition*. Oxford University Press, 2007.

[40] Faisyal Rani, "*Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)",* Jurnal Transnasional Vol. 4, No. 2 (Februari 2013), hal. 2.

[41] Millenium Ecosystem Assessment 2005:1)

negara dan ekonomi, namun memiliki kemiripan dalam memandang industrialisme.[42] Green political theory mengkritik Liberalisme dan Marxisme Ortodoks yang menggunakan hubungan instrumental antara manusia dengan non-manusia, serta penaklukan atas bentuk-bentuk tradisional seperti masyarakat adat serta budaya agrikultur. Green theory mengangkat kritik tersebut sebagai biaya sosial, lingkungan dan psikologis demi kelangsungan modernisasi.[43] Green theory juga mempertanyakan antroposentrisme, paham yang mengutamakan manusia atas makhluk hidup lainnya. Green theory menganggap bahwa bentuk campur tangan manusia pada alam akan mengancam eksistensi makhluk hidup lainnya yang juga bergantung pada alam, termasuk manusia sendiri.[44] Dunia internasional, dalam pandangan Green theory, tidak hanya dipengaruhi oleh manusia namun juga keterlibatan makhluk hidup lain beserta relasinya dengan manusia. Lebih jauh, Green theory memperjuangkan 'ekonsentrisme', paham yang menghargai semua bentuk kehidupan dalam sifatnya yang berbeda demi keselamatan diri mereka sendiri dan tidak hanya menjadi instrumen bagi manusia. Dengan demikian, green theory menganjurkan pendekatan kritikal pada penilaian atas usulan pembangunan baru, perkembangan teknologi dan praktik penilaian risiko.[45]

Asumsi dasar dari pemikiran Green theory adalah think globally and act locally, dalam artian bahwa isu lingkungan menjadi isu internasional dengan pemecahan

---

[42] Eckersley, Robin. Op.Cit, hal. 261.
[43] Ibid.
[44] Sri Harini Wijayanti, *GREEN THEORY SEBAGAI TEORI KONTEMPORER DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*, diakses dari http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105200-Teori%20Hubungan%20Internasional%20SOH201-GREEN%20THEORY%20SEBAGAI%20TEORI%20KONTEMPORER%20DALAM%20ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html pada 10 Oktober 2014.
[45] Eckersley, Robin. Op.Cit, hal. 261.

yang dipikirkan bersama-sama oleh setiap negara dan penyelesaian yang dilakukan di masing-masing negara sehingga dapat tercapai hasil yang efisien dan efektif. Penggunaan Green Theory ini dapat terlihat dari bagaimana rencana strategis yang dirancang WWF Indonesia melalui HoB Initiative mengutamakan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan mengutamakan lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem dan masyarakat luas, terutama dalam menghadapi fenomena deforestasi seperti yang terjadi di pulau Kalimantan.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Peneliti memilih metode penelitian ini karena penelitian kualitatif mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yang bertujuan meningkatkan pemahaman. Dimana secara terminologis penelitian kualitatif ingin memberikan gambaran suatu strategi penelitian secara akurat yang bertujuan memperoleh gambaran yang rasional dan lebih mendalam dengan perolehan data yang ekstensif pada beberapa variabel dengan pendekatan naturalistik inkuiri.[46]
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang merupakan pengumpulan data-data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, koran, dan media massa lainnya.

[46] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi),Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan*), diakses di http://Kbbi.Web.Id/Pengaruh pada 13 Oktober 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Karya tulis yang berjudul "Upaya WWF Indonesia Dalam Menanggulangi Deforestasi di Pulau Kalimantan Melalui Kerangka Kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative Tahun 2007-2013" ini akan diuraikan ke dalam lima bab besar. Pada Bab I menjelaskan latar belakang penelitian dan penjelasan mengenai kondisi hutan di pulau Kalimantan serta permasalahan yang timbul akibat deforestasi dan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei dengan difasilitasi oleh WWF. Agenda tersebut kemudian memelopori terbentuknya Heart of Borneo Initiative sebagai kerangka kerja penanggulangan Deforestasi di Kalimantan. Bab ini juga meliputi rumusan masalah, kerangka pemikiran, metoda dan teknik penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II difokuskan pada pembahasan mengenai WWF sebagai aktor non-pemerintah yang terlibat langsung dalam usaha penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kalimantan. Dalam bab ini dijelaskan serba-serbi keorganisasian WWF International dan WWF Indonesia serta latar belakang pendirian HoB Initiative di Kalimantan.

Bab III akan membahas mengenai fenomena deforestasi yang terjadi di pulau Kalimantan. Dalam bab ini akan dijabarkan kondisi hutan hujan tropis di Kalimantan, faktor-faktor penyebab terjadinya deforestasi serta dampaknya bagi kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan.

Bab IV akan menganalisa mengenai apa saja upaya yang dilakukan WWF Indonesia melalui kerangka kerja HoB Initiative, termasuk didalamnya program-program utama yang ditetapkan HoB Initiative dan implementasinya ke dalam berbagai

program kerja dan kebijakan. Dalam bab ini juga penulis akan menjawab pertanyaan penelitian dari karya tulis ini, yaitu ‘apa upaya WWF Indonesia melalui kerangka kerja Heart of Borneo Initiative dalam penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan ?’

Bab V akan menjadi bab penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan rangkuman dari seluruh pembahasan karya tulis, terutama berkaitan dengan upaya WWF-Indonesia dalam penanggulangan deforestasi di Kalimantan.

BAB II

WWF SEBAGAI ORGANISASI NON-PEMERINTAH (NGO) BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini, akan dideskripsikan serba-serbi terkait World Wild Fund For Nature (WWF) sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang berbasis pada lingkungan hidup. Uraian dalam bab ini meliputi sejarah singkat berdirinya WWF serta peran WWF dalam lingkungan hidup di Indonesia.

2.1. Sejarah Singkat WWF International

Perjuangan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup telah menjadi perhatian dunia internasional sejak lebih dari setengah abad silam. Beberapa organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah yang memusatkan perhatiannya pada lingkungan hidup seperti IUCN[47] dan The Conservation Foundation telah lebih dulu berdiri dan mengembangkan usaha-usaha konservasi sumber daya alam sebelum kelahiran WWF sendiri.

Di tahun 1961, Sir Julian Haxley, seorang konservatoris dan direktur pertama UNESCO, melakukan kunjungan penelitian ke sepuluh negara di kawasan Afrika

---

[47] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) adalah organisasi pelestarian lingkungan hidup internasional yang berfokus pada penelitian, analisis dan pengumpulan data. IUCN didirikan tahun 1948 di Fontainebleau, Prancis. (sumber: http://www.iucn.org/secretariat/about, diakses pada 5 September 2015)

Tengah dan Timur. Hasil penelitiannya dituangkan dalam tiga seri artikel yang dirilis oleh harian The Observer, 13 November 1960.[48] Dalam kumpulan artikelnya tersebut, Huxley memperingatkan masyarakat Inggris terkait banyaknya habitat satwa liar yang ekosistem alam yang terancam oleh berbagai aktivitas manusia seperti perburuan liar, dan adanya bahaya kepunahan habitat dan ekosistem tersebut dalam 20 tahun mendatang.[49] artikel-artikel ersebut mengundang respon dari publik Inggris. Salah satunya adalah Victor Stolan, seorang penguasaha hotel berdarah Cekoslowakia.

Dalam surat yang dilayangkan Stolan 6 Desember 1960, ia menyarankan pentingnya sebuah organisasi internasional yang bertugas sebagai lembaga pendanaan sosial guna menjaga keberlangsungan usaha konservasi alam.[50] Usul yang diangkat Stolan tersebut membawa Huxley pada Max Nicholson, direktur utama Britain's Nature Conservancy, yang selanjutnya membuat sebuah pertemuan dengan segenap ilmuwan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan sejumlah pengusaha serta pakar hubungan masyarakat guna membahas pembentukan organisasi internasional seperti yang diusulkan Stolan. Dalam pertemuan itu turut hadir Peter Scott, Wakil Presiden IUCN yang selanjutnya menjadi ketua WWF pertama. Pertemuan yang berlangsung di markas IUCN di kota Morges, Swiss pada 29 April 1961 tersebut melahirkan Morges Manifesto, sekaligus menjadi awal dari lahirnya World Wildlife Fund atau yang kini dikenal sebagai WWF. WWF sendiri

---

[48] "WWF in the 60's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/sixties/, diakses pada 5 September 2015.
[49] Kumpulan artikel Sir Julian Huxley terkait lingkungan hidup dapat diakses di http://www.theguardian.com/environment/2010/nov/07/wwf-world-wildlife-fund-huxley.
[50] *Loc.cit.*

secara resmi didaftarkan sebagai organisasi amal internasional pada 11 September 1961, dengan kantor pusat di Morges, Swiss.[51]

A. Mark II

WE MUST SAVE THE WORLD'S WILD LIFE

An International Declaration

Signed Copy

All over the world today vast numbers of fine and harmless wild creatures are losing their lives, or their homes, in an orgy of thoughtless and needless destruction.
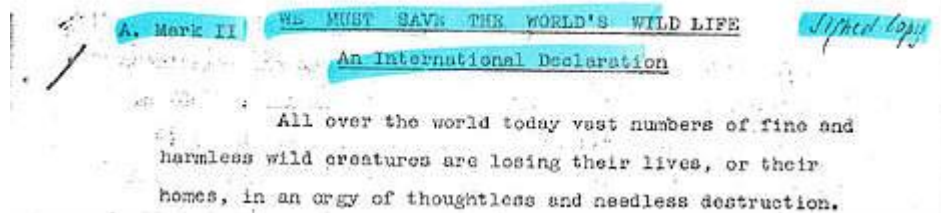
Gambar 2.1.: Potongan kutipan dari halaman pertama Morges Manifesto, dokumen yang menandai berdirinya WWF pada 29 April 1961.[52]

Guna mencapai hasil maksimal, WWF mulai membuka kantor-kantor cabang di berbagai negara. Mereka kemudian meluncurkan program Petisi Nasional (*National Appeals*) yang berfungsi untuk mengalihkan sekitar dua-pertiga dana yang terkumpul ke kantor pusat, dengan petisi nasional pertama lahir di Inggris pada 23 November 1961, disusul Petisi Nasional Amerika Serikat pada 1 Desember dan di Swiss beberapa hari kemudian.[53] Petisi-petisi nasional ini di kemudian hari dikenal sebagai Organisasi Nasional WWF (*National Organizations of WWF*), dengan 24 diantaranya berafiliasi dengan WWF International dan 5 organisasi yang beroperasi dengan nama-nama yang berbeda namun tetap berkaitan dengan WWF. Setiap organsasi nasional merupakan badan hukum terpisah dan bertanggungjawab atas manajemennya dan tiap-tiap donor.[54] Adapun WWF Internasional

---

[51] *Loc.cit.*

[52] *"50 years of environmental conservation"*, http://wwf.panda.org/who_we_are/history/, diakses pada tanggal 28 Mei 2015.

[53] *Loc.cit.*

[54] *"WWF In the 60's"*, http://wwf.panda.org/who_we_are/history/sixties/, diakses pada 7 Juli 2015.

bertanggungjawab pada semua organisasi nasional, donor dan pemerintah Swiss. Anggota-anggota pengurus pusat komite WWF International sendiri ditarik dari sejumlah ketua umum atau pengurus pusat dari organisasi nasional.

Di awal berdirinya, WWF melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi lingkungan hidup internasional seperti IUCN, International Council for Bird Preservation (sekarang menjadi Birdlife International), International Waterfowl Research Bureau dan International Youth Federation for the Study and Conservation of Nature, guna melangsungkan program kerjanya.[55] Di tiga tahun pertamanya, WWF mampu mengumpulkan donasi sebesar 1,9 juta Dollar untuk proyek-proyek konservasi. Kebanyakan dana yang didapat terkumpul dari individu-individu yang tergerak oleh sejumlah artikel promosi yang disebar melalui surat kabar. Salah satunya antara lain profil WWF International sebanyak tujuh halaman di surat kabar Daily Mirror[56] yang mendorong publik Inggris mendonasikan hingga 60.000 Poundsterling dalam satu minggu setelah publikasi.[57]

Donasi awal WWF International ditujukan pada Charles Darwin Foundation untuk pembangunan dan pemeliharaan Galapagos National Park. Pendanaan WWF ini digunakan untuk mengendalikan spesies flora dan fauna yang tergolong langka serta membuat program pendidikan dan pelatihan.[58] Beberapa program lain yang mendapat donasi awal WWF antara lain program perlindungan populasi Keledai Liar India di tahun 1962, program pemeliharaan Taman Nasional Maasai Mara,

---

[55] *Loc.cit.*
[56] "*50 Years On, We're Changing The Picture*", http://www.wwf.org.uk/wwf_articles.cfm?unewsid=4527, diakses pada 28 Mei 2015.
[57] *Op.cit.*
[58] *Op.cit.*

Kenya, serta pembangunan Taman Nasional Coto Donnana dan pembelian lahan Delta Guadalquivir tahun 1969 sebagai upaya penyelamatan elang Spanyol dan Lynx Iberia.[59]

Di tahun 1970, Pangeran Bernhard dari Belanda yang kala itu menjabat sebagai Presiden WWF International, meluncurkan inisiatif bagi WWF untuk mempunyai dana tetap dan bersifat independen. Dimulailah program 'The 1001: A Nature Trust', dimana setiap 1001 individu berkontribusi sebesar 10.000 Dollar.[60] Program tersebut digunakan WWF untuk kepentingan biaya administrasi dan pengelolaan organisasi secara mandiri.

Dekade 1970-an menjadi era penting bagi WWF dalam upaya pelestarian hutan lindung dan kawasan-kawasan cagar alam di seluruh dunia. Tahun 1975, WWF meluncurkan program Kampanye Hutan Hujan Tropis Sedunia (Tropical Rainforest Campaign) yang pertama. Kampanye tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dana dan menyiapkan sejumlah area hutan tropis di kawasan Afrika Barat & Tengah, Asia Tenggara dan Amerika Latin sebagai proyek percontohan guna dijadikan hutan lindung dan taman nasional.[61] Proyek yang kini dikenal sebagai WWF Forest Programme ini telah membawahi sekitar 350 prorgram lain yang tidak hanya berpusat pada konservasi hutan tropis namun juga hutan beriklim sedang.[62]

---

[59] *Op.cit.*
[60] "*WWF In The 70's*", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/seventies/, diakses pada 28 Mei 2015.
[61] *Loc.cit.*
[62] *Loc.cit.*

Selain pelestarian hutan, WWF juga memulai konsentrasinya pada penyelamatan fauna liar dan spesies-spesies langka. di tahun 1973, WWF bekerjasama dengan pemerintah India meluncurkan 'Project Tiger', guna menyelamatkan populasi harimau asli India yang terancam kepunahan melalui penyadaran masyarakat dan pengumpulan donasi. Adapun pemerintah India melalui Perdana Menteri Indira Gandhi menyiapkan panitia kerja yang bertugas merancang rencana pelestarian harimau berjangka enam tahun serta menyiapkan sembilan lahan reservasi harimau.[63]

Di tahun 1976, WWF memulai kampanye 'The Seas Must Live' sebagai program awal penyiapan habitat cadangan bagi ikan paus, anjing laut dan lumba-lumba serta pelindungan habitat penyu laut.[64]

Isu perburuan hewan liar dan perdagangan hewan langka beserta komoditasnya seperti cula badak dan gading gajah membuat WWF bersama IUCN membangun sebuah badan pengawas perdagangan hewan dan komoditinya. Badan yang kemudian bernama Trade Records Analysis of Fauna and Flora in Commerce (TRAFFIC) ini resmi beroperasi di UK tahun 1976.[65] Melalui TRAFFIC, WWF dan IUCN mampu berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah-pemerintah sedunia untuk meningkatkan perlindungan spesies langka dan penguatan pengawasan perdagangan hewan liar. Hingga akhir dekade 1970-an, WWF berhasil berkembang dari sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus

---

[63] *Loc.cit.*
[64] "*WWF In The 70's*", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/seventies/, diakses pada 28 Mei 2015.
[65] *Loc.cit.*

pada spesies langka dan pencegahan kerusakan alam, menjadi sebuah institusi internasional yang berkonsentrasi pada seluruh isu pelestarian lingkungan.

Di awal tahun 1980, WWF bekerjasama dengan IUCN dan United Nations Environment Programme (UNEP) membangun Strategi Konservasi Nasional (*National Conservation Strategy*) yang didukung oleh majelis umum PBB dan dicanangkan di 34 negara.[66] Strategi ini menggunakan pendekatan Holistik (Holistic Approach) dalam usaha pelestarian lingkungan dan menyoroti pentingnya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pasca-peluncurannya, sebanyak 50 negara telah merumuskan dan memulai strategi konservasi nasionalnya secara mandiri. strategi yang dipublikasikan dengan tajuk 'How To Save The World' tersebut telah diterbitkan dalam beberapa bahasa.[67]

Dalam kampanyenya meningkatkan basis dukungan masyarakat di dunia, di tahun 1983 WWF meluncurkan Koleksi perangko konservasi berkolaborasi dengan Groth AG.[68] Melalui program ini, WWF dan Groth AG telah menjual perangko hingga ke 200 negara guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kepunahan spesies langka. program tersebut telah menyumbang hingga 13 juta Dollar.[69]

---

[66] "*WWF In The* 80's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/eighties/, diakses pada 28 Mei 2015.

[67] *Ibid.*

[68] "*WWF stamp collection helps conservation*", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/eighties/, diakses pada 7 Juli 2015.

[69] "*WWF In The* 80's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/eighties/, diakses pada 28 Mei 2015.

Di tahun 1986, WWF international secara resmi mengganti kepanjangan namanya dari 'World Wildlife Fund' menjadi 'World Wide Fund for nature' sebagai refleksi peralihan pandangan organisasi dan aktivitasnya yang meluas.[70] Nama 'World Wildlife Fund' sendiri masih digunakan oleh perwakilan WWF di AS dan Kanada.[71] Dalam perayaan ulang tahunnya kedua puluh lima, WWF mengundang sejumlah pimpinan dari 5 benua utama dalam kunjungan ke kota Assisi, Italia selama dua hari. Dalam kunjungan tersebut, para pemimpin merilis deklarasi yang menyatakan bahwa konservasi merupakan unsur fundamental bagi negara tersebut.[72] Deklarasi ini berlanjut menjadi sebuah jaringan internasional dimana delapan kelompok agama besar turut berpartisipasi didalamnya.

Meskipun WWF merupakan organisasi non-pemerintah, banyaknya hubungan kerjasama yang dibangun dengan berbagai pemerintah membuat WWF mampu membangun posisi yang independen guna mengurangi tekanan pemerintah dalam pengambilan keputusan, namun tetap berhubungan secara normal dengan pihak pemerintah. Salah satu efek dari hubungan yang bresifat harmonis adalah mampunya WWF melakukan negosiasi bersifat *debt-for-nature swaps*, dimana porsi hutang di tiap negara dapat dikonversi kedalam donasi atau konservasi. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan di beberapa negara seperti Ekuador, Madagaskar, Filipina dan Zambia.[73]

---

[70] *Loc.cit.*
[71] http://www.worldwildlife.org/, website resmi WWF Amerika Serikat.
[72] Rincian terkait pertemuan dan deklarasi tersebut dapat diakses di http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/environment/histewardshiprev2.shtml.
[73] "*WWF In the* 80's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/eighties/.

Dasawarsa 1990 dibuka dengan perubahan sejumlah misi dan strategi. Dalam mengulang komitmennya terkait pelestarian lingkungan, WWF mengklasifikasi tugas kerja organisasi kedalam tiga kategori, yakni: (1) melindungi keanekaragaman hayati; (2) mempromosikan konsep penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan; (3) mereduksi polusi dan tingkat konsumsi SDA non-efisien.[74] Strategi yang digunakan antara lain desentralisasi pengambilan keputusan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat lokal.

Di tahun berikutnya, WWF bersama IUCN dan UNEP kembali bekerjasama dalam peluncuran 'Caring For The Earth - A Strategy For Sustainable Living',[75] sebuah *roadmap* dalam melaksanakan pemeliharaan alam bersifat berkelanjutan.[76] Strategi ini menghasilkan 132 aksi masyarakat baik bersifat sosial atau politik di lebih dari 60 negara. Aksi-aksi tersebut bersifat melindungi atau meningkatkan taraf lingkungan sembari ikut menaikkan kualitas hidup manusia. Tujuan penting yang dapat dicapai adalah bagaimana manusia dapat menjamin masa depan bumi dengan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Hal ini dapat mereduksi kerusakan akibat polusi udara dan resiko hujan asam, serta menurunkan tingkat perubahan iklim dan cuaca. WWF berperan dalam menyadarkan manusia dan pemerintahan terkait implikasi perubahan iklim serta mengajak mereka mengurangi aktivitas polutif hingga taraf minimum.[77]

---

[74] "*WWF In the 90's*", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/nineties/, diakses pada 28 Mei 2015.
[75] Info lebih lanjut terkait roadmap diatas dapat diakses di https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/CFE-003.pdf.
[76] *Loc.cit.*
[77] *Loc.cit.*

Tahun 1990, WWF berperan dalam pembuatan moratorium internasional tentang perdagangan gading gajah.[78] Di tahun 1992 WWF juga berperan dalam menekan negara-negara untuk menandatangani 'Convention on Biological Diversity and Climate Change'[79] pada penyelenggaraan Earth Summit di Rio De Janeiro.[80] Penyelenggaraan Earth Summit yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri sangat membantu WWF dalam menyadarkan para politisi dan pebisnis terkait pentingnya pengaruh krisis lingkungan hidup dalam kehidupan modern. Pasca-Earth Summit, WWF berhasil membangun jaringan relasi yang lebih luas kepada kelompok pebisnis, seperti kerjasama WWF dengan para pengusaha retail dan manufaktur di Inggris untuk pengurangan penjualan kayu tanpa sertifikat resmi dan berasal dari hutan yang tidak dikelola berkelanjutan.[81]

Di akhir tahun 1993, Charles De Haes yang menjabat sebagai *General Director* WWF International resmi digantikan oleh Claude Martin. Di tahun yang sama, WWF membuat evaluasi dua tahunan terhadap program-program pelestariannya. Dari situ, Claude mulai memfokuskan aktivitas pelestariannya kepada tiga sektor: (1) hutan, (2) ekosistem air tawar, serta (3) ekosistem kelautan.[82]

Selain bekerjasama dengan kelompok pemerintah dan pengusaha, WWF juga memelihara jaringannya dengan sesama organisasi non-pemerintah, baik nasional maupun internasional. Jaringan yang dibangun tersebut membantu WWF dalam

---

[78] "*To Save An Elephant*", Allan Thornton & Dave Currey, Doubleday: 1991
[79] "*CBD COP-12*", http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/policy/conventions/cbd/cop12/.
[80] *Loc.cit.*
[81] "*WWF In The* 90's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/nineties/, diakses pada 28 Mei 2015.
[82] *Loc.cit.*

merespon kebutuhan konservasi lokal serta bekerja dengan masyarakat dalam. Semakin banyak program yang melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan akan semakin menolong proses pelestarian lingkungan yang dimilikinya sembari menghasilkan insentif ekonomi. Salah satu contoh program yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal antara lain program konservasi Kafue Flats di Zambia,[83] dimana WWF membantu pemerintah dalam menghubungkan program pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Dalam proyek tersebut masyarakat lokal dididik untuk secara mandiri mengawasi dan melaporkan penurunan populasi Antelope jenis Lechwe (*Kobus leche).*

Strategi WWF yang bersifat kooperatif dan pengerjaan program berbasis kemitraan menjadi senjata utama dalam pelestarian lingkungan hingga saat ini. Kerjasama yang dibangun bersama kalangan pemerintah dengan memosisikan diri sebagai *lobbyist* ataupun kolaborator disinergikan dengan lembaga-lembaga konservasi dan masyarakat lokal. Dihubungkan dengan dukungan donasi finansial oleh masyarakat global, WWF mampu menyelenggarakan sejumlah proyek pelestarian lingkungan hidup di seluruh dunia.

[83]"*Case study on river management: Kafue Flats*", http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/rivers/irbm/cases/kafue_river_case_study/, diakses pada 28 Mei 2015.

2.2. WWF di Indonesia

World Wide Fund for Nature (WWF)[84] mulai bekerja di Indonesia sebagai kantor program dari WWF International di awal tahun 1961, dibawah pengawasan Kementerian Kehutanan.[85] Tahun 1962 tercatat sebagai tahun pertama WWF melakukan studi pertamanya di Indonesia bertempat di Ujung Kulon, dengan proyek perdana konservasi badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*).[86] Saat itu berdasarkan hasil studi, ditemukan sekitar 20 hingga 29 badak di Ujung Kulon. Adapun jejak tapak kaki anak badak Jawa pertama kali teridentifikasi oleh Dr. Rudolph dan Dr. Lotte Schenkel pada tahun 1968 di kawasan yang sama.[87] Dari situ, studi ekologi, sosiologi, dan perilaku badak Jawa di Ujung Kulon mulai dilakukan, dimulai dengan pendirian Pusat penelitian biologi di Pulau Peucang serta penyusunan dokumen pertama mengenai rencana strategi konservasi badak.[88] Pengkajian tersebut sekaligus menjadi titik awal penelitian terkait lingkungan hidup oleh WWF International di Indonesia. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an WWF mulai memperluas area penelitian dengan melakukan survei pertama orangutan Sumatera di Gunung Leuser, Aceh serta bekerjasama dengan pemerintah RI dan Frankfurt Zoological Society mendirikan Bohorok Orangutan Centre dan Stasiun Riset orangutan Ketambe di kawasan Gunung Leuser.[89] Selain Pulau Sumatera,

---

[84] hingga tahun 1986 WWF dikenal sebagai World Wildlife Fund. Nama ini masih dipakai di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada.
[85] "50 Tahun WWF di Indonesia", http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/50_tahun_wwf_di_indonesia/, diakses pada 26 Februari 2015.
[86] WWF-Indonesia. 2012. "*5 Dekade WWF di Indonesia*". Jakarta: Tim Redaksi WWF-Indonesia.
[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*
[89] *Ibid.*

WWF juga pertama kali memulai penelitian di pulau Kalimantan dengan melakukan survei badak bercula dua di kawasan Banumuda, Kaltim.[90] Dekade 1980-an WWF mulai mengalihkan perhatian pada program promosional dan *raising awareness* pada masyarakat luas via inisiasi kampanye hutan hujan tropis dan peluncuran perangko seri orangutan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.[91] Penelitian generasi awal WWF International di Indonesia mulai membuahkan hasil dengan sejumlah hasil studi terkait penelitian populasi badak Jawa dimana diperkirakan terdapat sekitar 40 hingga 50 ekor badak di kawasan Ujung Kulon.[92] Di dasawarsa tersebut, beberapa penelitian WWF tetap berlanjut, antara lain survei dan monitoring badak Sumatera dilakukan di Gunung Leuser, inisiasi program konservasi kelautan di Indonesia, serta pembukaan kantor penelitian di provinsi Irian Jaya (sekarang Papua Barat). Perluasan wilayah penelitian WWF berlanjut di era 1990-an dengan dimulainya upaya memadukan program konservasi dan pembangunan di Nusa Tenggara serta penelitian lanjutan di Taman Nasional (TN) Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan. Di dekade ini, penelitian di kawasan pulau Kalimantan juga berlanjut dengan perubahan status kawasan cagar alam Kayan Mentarang menjadi Taman Nasional yang didukung oleh masyarakat adat pada tahun 1996. Selain itu, Program Sertifikasi Hutan Lestari (Forest Stewardship Council/FSC) pada sejumlah hutan hujan di Indonesia termasuk di Pulau Kalimantan juga mulai diterapkan di Indonesia.[93]

---

[90] *Ibid.*
[91] *Ibid.*
[92] *Ibid.*
[93] *Ibid.*

Pada masa-masa itu, Status WWF di Indonesia sendiri adalah sebagai *Country Programme* dari WWF International dengan nama *WWF Indonesia Programme*. Hingga pada bulan April 1998, *WWF Indonesia Programme* secara hukum diakui sebagai organisasi Indonesia berstatus yayasan dengan mengganti nama menjadi WWF-Indonesia. Perubahan ini sekaligus menjadikan WWF-Indonesia sebagai bagian dari *WWF Global Network*, dimana terdapat sebanyak 27 Organisasi Nasional, 6 Organisasi Asosiasi dan 22 kantor program.[94]

Pasca-bergantinya status sebagai Organisasi Nasional, WWF-Indonesia mulai membagi beberapa konsentrasi penelitian dan konservasinya kedalam tiga kantor bioregion, antara lain kantor Sundaland, Walacea dan Sahul guna melaksanakan proyek pelestarian di wilayah *Global 200 Ecoregions*,[95] yakni wilayah-wilayah konservasi di seluruh dunia yang menjadi perhatian utama WWF International, dimana terdapat ekosistem dan habitat penting yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain di dunia.[96] Di dekade ini, pulau Kalimantan ikut menjadi perhatian utama pada upaya konservasi alam oleh WWF-Indonesia. Pada tahun 2001, WWF-Indonesia memulai kerja konservasi di kawasan Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain itu, kampanye perlindungan kawasan Sebuku-Sembakung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur mulai dilakukan untuk melindungi hutan dataran tinggi Kalimantan yang menjadi daerah jelajah gajah

[94] "Sejarah WWF-Indonesia", http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/sejarah/, diakses pada 26 Februari 2015.
[95] *Loc. cit.*
[96] "Earth's most special places", http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/, diakses pada 26 februari 2015.

Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*).[97] Di tahun 2005, WWF-Indonesia juga memulai pembuatan tabat untuk menutup aliran kanal di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, guna mencegah kebakaran hutan dan lalulintas kayu illegal.[98]

Pada dasawarsa ini, pengkonsentrasian konservasi di kawasan pulau Kalimantan secara masif dimulai, dengan titik utamanya adalah berdirinya Heart of Borneo (HoB), sebuah deklarasi inisiatif yang diprakarsai oleh tiga negara yang berada di pulau Kalimantan, yakni Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia, sebagai penyadaran akan pentingnya hutan Kalimantan dalam menjaga kehati dan ekosistem global. HoB mengedepankan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta kesejahteraan masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah HoB.[99]

Selain pengkonsentrasian pada pulau Kalimantan, secara keseluruhan, WWF-Indonesia telah membantu pemerintah didalam pembentukan berbagai area konservasi hutan, di antaranya Taman Nasional Wasur, Taman Nasional Lorentz, dan Cagar Alam Arfak Strict di Papua, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Betung Kerihun di Kalimantan serta Taman Nasional Bukti Tigapuluh di Sumatra.[100]

---

[97] WWF-Indonesia. 2012. "5 Dekade WWF di Indonesia". Jakarta: Tim Redaksi WWF-Indonesia.
[98] *Ibid.*
[99] WWF-Indonesia. 2014. "Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau" hal. 19. Jakarta: Tim Redaksi WWF-Indonesia.
[100] "50 Tahun WWF di Indonesia", http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/50_tahun_wwf_di_indonesia/, diakses pada 26 Februari 2015.

2.2.1. Visi Dan Misi WWF Indonesia

WWF Indonesia sebagai sebuah organisasi konservasi alam independen di Indonesia memiliki visi *"Ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dan merata, untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang".*[101] Adapun dalam menjalankan visinya, misi utama WWF Indonesia adalah melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang dicapai melalui upaya: (1) Menerapkan dan mempromosikan praktik-praktik konservasi terbaik yang berbasis sains, inovasi dan kearifan tradisional; (2) Memfasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan, membangun koalisi dan bermitra dengan masyarakat madani, dan bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta; (3) Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi konservasi di kalangan masyarakat Indonesia; (4) Melakukan advokasi dan mempengaruhi kebijakan, hukum, dan institusi terkait untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik.[102]

Dalam mewujudkan visi dan misi yang ditargetkan, WWF Indonesia mengembangkan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) dalam kurun waktu empat tahunan (*quadrennial*). Rencana strategis tersebut disusun untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah terus hilangnya

---

[101] http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/
[102] *Loc.cit.*

keanekaragaman hayati, sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.[103]

2.2.2 Heart of Borneo (HoB) Initiative Sebagai Proyek Kerjasama

Heart of Borneo Initiative (HoB) adalah sebuah kerjasama lintas batas (*transboundary effort*) antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengupayakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di pulau Kalimantan serta mengurangi laju deforestasi, degradasi hutan dan kehancuran ekosistem dan keanekaragaman hayati.[104]

Prakarsa mula dari HoB adalah sebuah proyek kerjasama International Tropical Timber Organization (ITTO) Indonesia dan Malaysia bertajuk 'Trans-boundary Conservation', dimana ditetapkan Taman Nasional (TN) Kayan Mentarang dan TN Betung Kerihun di Indonesia serta Lanjak Entimau dan Pulung Tao di Malaysia sebagai percobaan konservasi di kawasan perbatasan. Sebagai kelanjutan dari proyek tersebut, WWF Sundaland Bioregion Indonesia menerbitkan proposal di tahun 2001 berjudul 'Borneo Mountain Forest'.[105] Proposal yang diterbitkan tersebut kemudian disetujui beberapa donor dan pada tahun 2003 dilakukan '*kick-*

---

[103] *Op.cit.*
[104] "Apakah Inisiatif Heart of Borneo Itu?", http://www.hobgreeneconomy.org/id/about/, diakses pada 21 Januari 2017.
[105] "Sejarah HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-on-track, diakses pada 28 Mei 2016.

off meeting' HoB antara Kementerian (kala itu masih bernama 'Departemen') Kehutanan dengan WWF Indonesia.[106]

Bulan April 2005 menjadi batu pertama dari berdirinya HoB Initiative. Pada bulan tersebut, diadakan pertemuan lokakarya di Brunei Darussalam (selanjutnya disebut Brunei) dengan sejumlah peserta dari berbagai pihak, antara lain UNESCO, ASEAN, IUCN, ITTO, CIFOR, GTZ, serta perwakilan dari tiga negara yang mendiami pulau Kalimantan secara keseluruhan; Indonesia, Malaysia dan Brunei.[107] Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu berkaitan dengan lingkungan hidup di pulau Kalimantan, seperti pengelolaan konservasi skala besar, permasalahan yang dihadapi di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan, serta penakan kebutuhan aktivitas lintas negara secara efektif.[108] Pertemuan tersebut menjadi krusial karena untuk pertama kalinya, sejumlah tiga negara mulai bekerjasama untuk membahas masa depan lingkungan hidup di pulau Kalimantan secara keseluruhan. Pertemuan itu menghasilkan visi serta rencana kerja awal dari HoB.

Di beberapa bulan berikutnya di tahun 2005, sejumlah titik penting dicapai terkait pendirian HoB. Pada tanggal 25-28 April, sejumlah makalah penelitian akademik berkaitan dengan kawasan HoB dipresentasikan di Leiden.[109] Di bulan Desember 2005, HoB Initiative secara luas mendapat dukungan dalam Konferensi Tingkat

---

[106] *Loc.cit.*
[107] Hitchner, Sarah L.: *Heart of Borneo as a 'Jalan Tikus': Exploring the Links Between Indigenous Rights, Extractive and Exploitative Industries, and Conservation at the World Conservation Congress 2008.* Conservation and Society, Year 2010, Volume 8, Issue 4.
[108] *Ibid.,*hal. 324.
[109] *Ibid.,*hal. 324.

Tinggi ASEAN (*ASEAN Leaders Summit*), salah satu dukungannya adalah pidato dukungan Perdana Menteri Malaysia kala itu (sekaligus pimpinan sidang ASEAN), Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.[110] Dalam KTT tersebut, HoB dipilih menjadi 'program unggulan' (*flagship programme*) dalam rancangan pembangunan lima tahun oleh Indonesia, Brunei, Malaysia serta Filipina yang dirangkum kedalam Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area (BIMP-EAGA).[111]

Pada tahun 2006, pengakuan pertama HoB dicapai pada Conference of the Parties (CoP) 8 – Convention on Biological Diversity (CBD) pada tanggal 27 Maret di Curitiba, Brasil. Dalam konferensi tersebut, pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei secara sepakat berkomitmen untuk menciptakan inisiatif kerjasama di bidang konservasi lingkungan, sekaligus mempublikasikan berdirinya HoB Initiative.[112] Di Indonesia sendiri, Kementerian Kehutanan mulai mempresentasikan inisiatif HoB pada rapat koordinasi terbatas di kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian di Jakarta. Sebelumnya, di tahun 2005 telah diselenggarakan juga sejumlah lokakarya tingkat provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) yang menghasilkan beberapa kesepakatan seperti konsep area HoB, formalisasi inisiatif HoB berupa deklarasi, lokakarya tingkat nasional, regional dan

[110] *Ibid.,*hal. 324.
[111] Hitchner, Sarah L.: *Heart of Borneo as a 'Jalan Tikus': Exploring the Links Between Indigenous Rights, Extractive and Exploitative Industries, and Conservation at the World Conservation Congress 2008.* Conservation and Society, Year 2010, Volume 8, Issue 4, hal. 323
[112] *Ibid.,*hal. 324.

internasional serta sosialisasi HoB ke seluruh pengemban tugas (*stakeholder*) terkait.[113]

Pada tanggal 12 Februari 2007, Deklarasi HoB Initiative secara resmi ditandatangani di Bali oleh masing-masing perwakilan dari tiga negara deklarator, antara lain Menteri Kehutanan Indonesia M.S. Kaban, *Minister of Natural Resources and Environment* –Malaysia Dato Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat serta *Minister of Industry and Primary Resources*–Brunei Darussalam Dato Seri Azmi Bin Khalid.[114] Secara garis besar, deklarasi tersebut mengikrarkan komitmen mereka untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan dan melindungi kawasan HoB. Deklarasi tersebut berisikan beberapa poin penting, antara lain: (1) diusahakannya bentuk kerjasama dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya secara efektif dalam jejaring kumpulan kawasan lindung, hutan produktif serta lahan lainnya kedalam sebuah kawasan besar bertajuk 'Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo/HoB*); (2) pembentukan kerjasama dalam HoB Initiative yang bersifat lintas-batas negara dan sukarela (*voluntary*) dengan mengkombinasikan kepentingan pengemban tugas, kearifan lokal serta peraturan dan kebijakan yang berlaku di tiap negara, serta; (3) pelaksanaan kerjasama berbasis pembangunan jangka panjang (*sustainable development*) dalam kawasan HoB.[115] Pasca penandatanganan deklarasi tersebut, mulai diselenggarakan pertemuan trilateral

---

[113] "Sejarah HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-on-track, diakses pada 28 Mei 2016.
[114] *Loc.cit.*
[115] "Tiga Negara Tandatangani Deklarasi Heart Of Borneo", http://www.kemendagri.go.id/news/2007/02/13/tiga-negara-tandatangani-deklarasi-heart-of-borneo, diakses pada 28 Mei 2016.

antara para pengemban tugas setiap tahunnya. Pada pertemuan trilateral kedua di Jakarta tahun 2008, terdapat poin penting yang berhasil disepakati oleh masing-masing negara, yakni terbentuknya lima program utama HoB yang dirangkum dalam *HoB Strategic Plan of Action*. Dalam rancangan strategi tersebut, setiap negara harus mencari dana sendiri untuk pengadaan proyek konservasi dalam tiap perbatasannya. Lebih lanjut lagi, dalam rancangan strategi itu dibahas juga mekanisme pendanaan seperti anggaran pemerintah, donor individu atau perusahaan, pembayaran jasa lingkungan hingga *carbon trade* untuk mendukung pelaksanaan program.[116]

2.2.2.1 Visi dan Misi HoB Initiative

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam *Ministerial Meeting* pertama HoB di Bali pada tahun 2007, visi Heart of Borneo Initiative adalah "Menjembatani konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tiga negara". Visi tersebut akan seterusnya dipakai kecuali jika tiga negara penandatangan deklarasi memutuskan untuk meninjau ulang atau memperbaiki visi tersebut.[117] Adapun dalam menjalankan visi tersebut, ditetapkan lima misi utama HoB sesuai dengan kesepakatan dalam *Ministerial Meeting* tahun 2007. Misi-misi tersebut antara lain: (1) mengelola sumber daya alam di luar dan di dalam jejaring kawasan lindung melalui pengembangan dan implementasi tata guna lahan yang lestari; (2)

---

[116] *Loc.cit.*
[117] "Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) 2015-2019", Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo (HoB), 2014, Hal. 2.

meningkatkan dan mengedepankan pengelolaan kawasan lindung yang efektif, dengan memprioritaskan kawasan lindung yang terletak di perbatasan, dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati hutan dan keterkaitan sistem ekologi; (3) mengelola isu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan; (4) mengenali, melestarikan, mempromosikan dan memanfaatkan secara lestari keindahan tempat-tempat alami serta wilayah bernilai budaya tinggi di kawasan HoB; dan (5) memastikan implementasi yang efektif terhadap inisiatif HoB untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan publik, swasta, serta masyarakat lokal.[118]

2.2.2.2 Strategi dan Tujuan HoB Initiative

Program HoB Initiative dkembangkan tidak hanya sekedar untuk tujuan konservasi alam, namun juga bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan yang telah ditetapkan HoB. Lingkungan serta keanekaragaman hayati merupakan pilar-pilar program HoB disamping sosial ekonomi dan pengembangan institusi.[119] Khusus di wilayah Indonesia sendiri, kerjasama lintas sektoral serta peran aktif dari pemerintah provinsi dan kabupaten yang berada di kawasan HoB menjadi sangat penting. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, terutama yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian pokok dalam pembangunan di kawasan HoB.[120]

---

[118] *Ibid.,* Hal. 2.
[119] "Strategi HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/understanding-heart-of-borneo, diakses pada 28 Mei 2016.
[120] *Loc.cit.*

Terdapat tiga tujuan pengelolaan kawasan HoB sebagaimana yang telah tercantum dalam pernyataan deklarasi, yakni: (1) mendorong pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan di jejaring kawasan konservasi, kawasan lindung serta hutan produksi dan penggunaan lahan lainnya; (2) terwujudnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung pengelolaan kawasan HoB secara berkelanjutan dengan memperhatikan perjanjian multilateral dan bilateral yang ada; (3) terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis kaidah-kaidah ilmiah dan kearifan lokal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peerapan pengelolaan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan pelatihan, maupun kegiatan lainnya yang relevan dengan pengelolaan lintas batas, konservasi dan pengembangan wilayah di kawasan HoB.[121]

2.2.3 Implementasi HoB Initiative di Indonesia

Sebagai sebuah inisiatif pemerintah, program dan kegiatan Heart of Borneo Initiative (HoB) diprakarsai oleh pemerintah bekerjasama dengan sejumlah mitra. Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Heart of Borneo Indonesia di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjaprov) di tingkat provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk

[121] *Loc.cit.*

memfasilitasi berbagai isu yang terjadi di tingkat nasional, begitu juga dengan Pokjaprov dan Pokjakab untuk setiap isu yang terjadi di masing-masing tempat.[122]

Pokjanas HoB berisikan anggota dari kementerian terkait dan perwakilan Pokjaprov yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Adapun kementerian dan lembaga instansi pemerintah lain yang tergabung dalam keanggotaan Pokjanas HoB antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.[123]

Dalam pengelolaannya, tugas-tugas Pokjanas HoB meliputi:

1. Untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Aksi Nasional dan Rencana Strategis termasuk revisi setiap waktunya;
2. Untuk mengkoordinasikan dan harmonisasi pelaksanaan program pengelolaan HoB serta rencana aksi dan strategis pada tingkat sektoral, inter-sektoral, dan propinsi;
3. Untuk mendukung sektor berkaitan dalam pengembangan nasional dan dasar kebijakan sektoral pada tujuan inisiatif HoB dan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok sektor;

---

[122] "Organisasi HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-in-indonesia, diakses pada 28 Mei 2016.
[123] *Loc.cit.*

4. Untuk membangun prinsip pengelolaan HoB, baik pada tingkat sektoral, inter sektoral atau propinsi, untuk mengikutsertakan isu-isu spesifik dalam peningkatan efektifitas guna pencapaian tujuan pengelolaan HoB;
5. Untuk mengkoordinasikan Sekretariat Nasional HoB secara langsung;
6. Untuk mengembangkan mekanisme pendanaan dan mengontrol pelaksanaannya dalam program pendanaan HoB;
7. Untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan HoB.[124]

Mitra kerjasama dari HoB sendiri adalah lembaga-lembaga terkait, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat atau sosial dan organisasi lainnya.

---

[124] *Loc.cit.*

BAB III

DEFORESTASI DI PULAU KALIMANTAN

Deforestasi menjadi salah satu permasalahan utama terhadap pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Secara garis besar, deforestasi yang terjadi di Indonesia merupakan akumulasi koruptif dari suatu sistem politik dan ekonomi yang hanya memandang sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang eksploitatif guna kepentingan politik ataupun pribadi.[125]

Pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan yang telah berjalan dalam waktu yang lama dianggap melalaikan prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan ataupun hak-hak penduduk lokal.[126] Bentuk-bentuk kelalaian seperti penyalahgunaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan alam untuk industri kayu secara masif serta lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi.[127] Salah satu kawasan yang mengalami kasus deforestasi di Indonesia adalah pulau Kalimantan.

Dalam bab ini akan dibahas seluk-beluk terjadinya deforestasi di Indonesia secara keseluruhan, serta kondisi hutan hujan tropis di pulau Kalimantan sebagai contoh riil ancaman deforestasi itu sendiri. Dari sini, dapat dilihat apa saja faktor-faktor

---

[125] FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia Indonesia & Washington D.C.: Global Forest Watch, hal. 25.
[126] *Ibid.,* hal. 25.
[127] *Ibid.,* hal. 25.

penyebab terjadinya deforestasi hingga dampak dan akibatnya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Selain itu, turut dibahas pula apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah kalimantan dalam usahanya mengurangi laju deforestasi.

3.1 Deforestasi dan Kondisi Hutan Hujan Di Kalimantan

Indonesia menempati peringkat ketiga (diluar Brasil dan Zaire) terkait kekayaan hutan hujan tropis, dimana 10% dari sisa sumber daya alam di dunia berada didalamnya.[128] Dalam REPELITA VI 1994/95 - 1998/99 disebutkan bahwa terdapat 92, 4 juta hektare (ha) lahan hutan pada tahun 1003 (RI 1994: 312).[129] Adapun dalam data satelit 1986-91 yang dirilis oleh Inventarisasi Hutan Nasional, diperkirakan terdapat sekitar 120,6 juta ha lahan hutan yang menutupi 69% kawasan Indonesia, diluar pulau Jawa (GOI/FAO 1996: 17-18).[130] Dari keseluruhan persebaran lahan hutan tropis tersebut, sekitar 32,0% berada di pulau Kalimantan, sekaligus menjadikannya daerah dengan persebaran hutan tertinggi di Indonesia.[131]

Namun demikian, hingga tahun 2000, sekitar 70% kawasan hutan tropis di indonesia telah lenyap. Berdasarkan penelitian FAO tahun 1990, tutupan hutan di Indonesia telah berkurang dari 74% menjadi 56% dalam jangka waktu 30-40 tahun

[128] *Laju dan Penyebab Deforestasi Di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya.* Occasional Paper No. 9, Dec 1996, Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, hal. 1.
[129] *Ibid.,* hal. 1.
[130] *Ibid.,* hal. 1.
[131] *Ibid.,* hal. 1.

(FAO 1990:3).[132] Sedangkan World Bank mencatat adanya peningkatan dalam estimasi deforestasi di tiap tahunnya: pada tahun 1970-an 300.000 ha/tahun; pada tahun 1981, 600.000 ha/tahun; pada tahun 1990 satu juta ha/tahun.[133]

Pulau Kalimantan sendiri telah mengalami deforestasi sebesar 1,3 juta ha/tahun dalam kurun waktu 2000 hingga 2002.[134] Laju deforestasi tersebut merupakan peningkatan drastis dari periode sebelumnya, yakni 800.000 ha di tahun 1997-2000.[135] Jika dihitung dari periode 1985 hingga 2002, pulau Kalimantan sudah kehilangan area hutan tropis seluas 13 juta ha.[136]

Kasus deforestasi yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan terbilang cukup lama, jika dirunut kembali dari masa kolonialisme Belanda hingga masa okupasi Jepang. Kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh VOC[137] melegalkan penebangan hutan serta pembukaan lahan untuk kepentingan pertanian melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang pada akhirnya mengubah fungsi hutan menjadi kebun tebu, kopi, nila dan karet.[138] Selain itu terdapat pula kebijakan penebangan hutan untuk kebutuhan konstruksi dan pembuatan kapal yang di kemudian hari menjadi awal dari peralihan fungsi hutan alam menjadi hutan industri.[139] Adapun di masa pendudukan Jepang di tahun 1941 hingga 1945,

---

[132] *Ibid.,* hal. 1.
[133] *Ibid.,* hal. 1.
[134] "Most of Borneo's lowland forests could be lost within the next decade – WWF", http://wwf.panda.org/ , diakses pada 1 Juli 2016.
[135] Borneo: Treasure Island At Risk, *Op.cit.*
[136] Borneo: Treasure Island At Risk, *Op.cit.*
[137] Verenigde Oostindische Compagnie, organisasi persekutuan dagang asal Belanda yang mengawali periode kolonialisasi Belanda di Indonesia.
[138] "Mengintip Sejarah Deforestasi di Indonesia", http://www.burung.org/ , diakses pada 1 Juli 2016.
[139] "Mengintip Sejarah Deforestasi di Indonesia", *loc.cit.*

deforestasi dilakukan dengan penebangan hutan jati serta hutan alam lainnya sebanyak dua kali lipat jatah tebangan tahunan, guna membiayain perang pasifik.[140]

Pada era pasca-kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan industrialisasi kayu melalui penerbitan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). HPH sendiri lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.[141] Di waktu yang sama, pengeksploitasian hutan mulai dipersenjatai dengan penerbitan Pedoman Tebang Pilih Indonesia, yang disempurnakan lagi menjadi Tebang Plih Tanam Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pulau Kalimantan menjadi objek eksploitasi hutan terbesar dimana dalam kurun waktu 1969 hingga 1974, sekitar 11 juta ha lahan konsesi HPH hanya dipusatkan di provinsi Kalimantan Timur.[142]

Berdasarkan tinjauan tutupan alamnya, penyusutan lahan hutan hujan tropis di Kalimantan terus mengalami grafik penurunan. Dari luas sekitar 38, 59 juta ha pada tahun 1990 atau 73, 91% dari luas Kalimantan, menjadi 29, 48 juta ha pada tahun 2000, 28, 42 juta ha pada tahun 2003 hingga 25, 48 juta ha pada tahun 2009.[143] Secara keseluruhan, luas tutupan lahan hutan hujan tropis di Kalimantan diperkirakan tersisa 47, 57% dari luas pulau, dengan rata-rata penurunan sebesar 720 ribu ha/tahun sejak 1990.[144]

---

[140] "Mengintip Sejarah Deforestasi di Indonesia", *loc.cit.*
[141] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 28.
[142] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 28.
[143] *Penyelamatan Ekosistem Kalimantan dalam Penerapan MP3EI*. Mei 2012, Jakarta: WWF-Indonesia/Jimmy Syahirsyah, hal. 6.
[144] *Ibid.,* hal. 6.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Deforestasi

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya deforestasi di pulau Kalimantan yang mengakibatkan kerusakan habitat dan ekosistem lingkungan hidup. Faktor tersebut antara lain penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi lahan hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri (HTI), serta penebangan yang tidak lestari (*unsustainable logging*).[145]

WWF International sendiri dalam laporannya bertajuk *'Borneo: Treasure Island At Risk'* menyebutkan pembangunan modern sebagai faktor awal terjadinya deforestasi. WWF menjelaskan bahwa konstruksi jalan industri (*industrial road construction*) menyebabkan tidak adanya lahan di pulau Kalimantan yang terbebas dari ancaman deforestasi. Pembangunan jalan dianggap sebagai kunci bagi terjadinya konversi lahan hutan secara masif, baik diperuntukkan bagi hunian ataupun lahan perkebunan.[146]

Namun terdapat pula faktor-faktor lain yang berbeda di tiap kawasan di pulau Kalimantan. baik kawasan Malaysia maupun Indonesia memiliki permasalahan terkait hak kepemilikan tanah adat antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Selain itu, pembangunan ekonomi yang berbasis industrialisasi menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara non-berkelanjutan serta tidak berimbangnya pengelolaan berjangka panjang terhadap SDM tersebut.[147]

---

[145] *Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca?.* 2005, Jakarta: WWF-Indonesia. Hal. 3.
[146] Borneo: Treasure Island At Risk, *Op.cit.*
[147] Borneo: Treasure Island At Risk, *Op.cit.*

3.2.1 Industrialisasi Hutan Melalui HPH

Pendapatan kotor devisa dari sektor kehutanan di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan dari US$ 6 juta di tahun 1969 menjadi US$ 564 juta di tahun 1974. Hasil kayu diekspor dalam bentuk log (gelondongan) ke sejumlah negara dan kawasan, antara lain Jepang (5,5 juta meter kubik/tahun), Australia (2,2 juta meter kubik/tahun), Afrika Selatan (4 juta meter kubik/tahun) serta Eropa (10 juta meter kubik/tahun).[148]

Pada tahun 1979, Indonesia telah menguasai 41% pangsa pasar kayu bulat tropis di dunia dengan omzet mencapai 2,1 miliar US$. Di masa itu pula, hutan menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak mentah dalam perekonomian nasional.[149]

Pencapaian tersebut tidaklah lepas dari longgarnya pemberian izin HPH itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pemberian izin HPH di awal masa berjalannya terbilang leluasa. Undang-Undang Kehutanan tahun 1967 memberikan dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu. Selain itu, banyak izin HPH yang dikeluarkan diberi hak untuk mengelola hutan selama 20 tahun.[150]

Masa Industrialisasi hasil hutan sempat memasuki periode konsolidasi ketika larangan ekspor kayu bulat diterapkan pada awal dekade 1980-an. Salah satunya dengan pendirian sejumlah perusahaan produsen kayu lapis.[151] Peralihan industri ini didorong oleh peraturan terkait HPH yang mewajibkan perusahaan pemilik atau

[148] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 28.
[149] *Ibid.*, hal. 28.
[150] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 28.
[151] *Ibid.*, hal. 30.

peminta izin konsesi HPH untuk memiliki atau menjalin hubungan dengan perusahaan lain yang memiliki pabrik pengolahan kayu.[152] Aturan tersebut mengerucutkan kepemilikan HPH pada kelompok perusahaan besar yang memiliki pabrik kayu lapis. Pada tahun 1994, tercatat 10 kelompok perusahaan terbesar mengontrol 28 juta ha (sekitar 45 persen) konsesi HPH di Indonesia.[153] Adapun di propinsi Kalimantan Timur sendiri, lahan konsesi HPH tersebar hingga 64% dari luas hutan yang tersedia.[154] Hingga tahun 1995, telah terdapat sekitar 585 konsesi HPH dengan luas mencakup 63 juta ha lahan di seluruh Indonesia.[155]

Walaupun HPH dimaksudkan untuk mempertahankan lahan-lahan hutan sebagai hutan produksi permanen, sistem konsesi ini secara ironis menjadi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Buruknya sistem pengelolaan lahan konsesi HPH diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dan transparansi kondisi hutan dari sejak masa diberlakukannya HPH.[156] Selain itu, adanya kolusi antara pemerintah pusat di era Orde baru dan kelompok industri kayu juga menyebabkan sistem pengelolaan lahan yang buruk. Pada awal tahun 2000, Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa "sebagian besar" hutan yang berada di lahan HPH berada dalam "kondisi rusak".[157] Pada laporan Kementerian Kehutanan yang dirilis bulan Juli 2000, ditunjukkan bahwa dalam hasil survei lahan hutan seluas 47 juta ha yang berada di area HPH aktif atau yang habis masa berlakunya, sekitar 30 persen mengalami

---

[152] *Ibid.*, hal. 30.
[153] *Ibid.*, hal. 30.
[154] *Ibid.*, hal. 30.
[155]*Ibid.*, hal. 30.
[156] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 32.
[157] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 32.

degradasi kualitas, baik berubah menjadi semak atau dikonversi menjadi lahan pertanian.[158] Selain itu hanya 40 persen yang masih diklasifikasikan sebagai hutan primer dengan kondisi baik.[159]

Meski sejak dekade 1990-an hingga sekarang dan luas total kawasan HPH mengalami penurunan, namun jumlahnya masih terbilang tinggi, dimana hampir separuh hutan tropis yang tersisa masih berada dibawah izin konsesi lahan dan berpotensi mengalami degradasi, ataupun telah mengalami degradasi.[160] Ancaman yang lain juga terdapat dalam kebijakan mengenai otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin HPH. Dikhawatirkan kebijakan tersebut tidak mengurangi pemberian izin lahan konsesi HPH, atau justru bertambah mengingat berkurangnya pengawasan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3.2.2 Pembalakan Liar

Illegal logging, atau yang dikenal dengan pembalakan liar, adalah bentuk kegiatan penebangan, penjualan dan pengangkutan kayu yang dilakukan secara tidak sah atau tidak memiliki izin otoritas setempat. Kegiatan pembalakan liar turut menjadi faktor utama terjadinya deforestasi.[161]

---

[158] *Ibid.*, hal. 32.
[159] *Ibid.*, hal. 32.
[160] *Ibid.*, hal. 33.
[161] Eko Sujatmiko, *Kamus IPS* , Surakarta: Aksara Sinergi Media Cetakan I, 2014 hal. 234

Pembalakan liar merupakan fenomena yang ditimbulkan akibat kebijakan ekspansi bersifat agresif dalam sektor kehutanan tanpa memperhatikan pasokan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.[162] Menurut Kementerian Kehutanan, permintaan kayu dari industri pengolahan kayu mencapai 58.200.000 meter kubik/tahun pada tahun 2000. Namun, hutan produksi hanya dapat menyediakan 25, 4 juta meter kubik.[163] Adanya selisih kebutuhan sebesar 33 juta meter kubik diyakini sebagai faktor pemicu pembalakan liar. Tercatat pada kurun waktu 1997/1998 penebangan kayu ilegal di Indonesia mencapai 33 juta meter kubik. Angka tersebut lebih besar dari hasil produksi resmi sebesar 29,5 juta meter kubik.[164] Dari situ, terlihat bahwa lebih dari separuh panen hutan adalah hasil ilegal. Dalam kurun dekade 1990-an terhitung pemerintah mengalami kerugian sebesar 3,5 miliar Dollar, atau sekitar sepertiga dari potensi pemasukan dari sektor kehutanan.[165] Penelitian juga menunjukkan bahwa 84 persen konsesi lahan hutan telah melanggar hukum dan melakukan pembalakan liar secara sistematik. Pembalakan liar bahkan dilakukan di beberapa kawasan taman nasional seperti Tanjung Puting, Kutai dan Betung Kerihun.[166] Pada tahun 2001, terhitung sekitar 50 juta meter kubik didapat dari pembalakan liar dengan rata-rata sekitar 20 meter kubik/ha.[167] Di tahun 2002, tercatat sekitar 5000 ha area hutan Indonesia telah dihabiskan untuk pembalakan liar dalam kurun waktu lima tahun. [168]

---

[162] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 34
[163] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 58
[164] *Ibid.,* hal. 58
[165] *Ibid.,* hal. 58
[166] *Ibid.,* hal. 59
[167] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 59
[168] *Ibid.,* hal. 59

Propinsi Kalimantan Timur terhitung mengalami kerugian di sektor pemasukan pajak akibat pembalakan liar dan penebangan ilegal hingga 100 juta Dollar per tahunnya.[169] Kerugian tersebut diambil dari sebanyak 3,3 juta meter kubik kayu ilegal sedangkan produksi resmi hasil hutan di Kalimantan Timur hanya sekitar 2,1 juta meter kubik per tahunnya.[170]

Korupsi menjadi faktor utama atas terjadinya kasus pembalakan liar. Tingginya jumlah permintaan kayu yang berbanding terbalik dengan hasil produksi memaksa pemilik konsesi lahan HPH melakukan kegiatan penebangan diluar izin yang diberikan. Ironisnya, pemerintah pusat dianggap turut campur dalam kegiatan pembalakan liar dengan membiarkan atau menutupi fenomena tersebut. Kedekatan kelompok-kelompok usaha kayu dengan keluarga Soeharto di era Orde Baru turut menyuburkan aksi penebangan ilegal yang terjadi selama puluhan tahun.[171] Tidak hanya keuntungan ekonomi yang didapat pada sektor kehutanan terbilang besar, pemerintah pusat pada rezim Soeharto juga memanfaatkan hubungan gelap ini guna membangun dukungan politik dan membiayai proyek-proyek terselubung. [172]

Fakta lain menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat dari pembalakan liar terbilang lebih besar dari penjualan kayu legal. Di Indonesia, perkiraan biaya untuk pengangkutan kayu legal hingga pabrik pengolahan sebesar 85 Dollar/meter kubik. Sedangkan biaya yang dikenakan pada kayu selundupan hanya sebesar 32 Dollar/meter kubik.[173] Adapun pada konsesi kayu kecil, perbandingan biaya yang

[169] *Ibid.,* hal. 59
[170] *Ibid.,* hal. 59
[171] *Ibid.,* hal. 60
[172] *Ibid.,* hal. 60
[173] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 60

sama berjumlah sekitar 46 Dollar/meter kubik dengan 5 DOllar/meter kubik. Margin pengeluaran yang besar tersebut membuat pembalakan liar terbilang marak hingga saat ini.[174]

3.2.3 Kebakaran Hutan

Pada umumnya, hutan hujan tropis alami tidak memiliki potensi untuk mengalami kebakaran hutan (*wildfires*). Kondisi area hutan yang memiliki tingkat kelembapan tinggi didukung oleh iklim tropik membuat pepohonan mudah untuk berdekomposisi tanpa menyisakan materi yang mudah terbakar.[175] Sedangkan hutan yang berada di area produksi dan telah mengalami degradasi dengan tumbuhnya semak belukar akan mudah terbakar di musim kemarau. Namun di sisi lain, jenis pepohonan yang tumbuh di area hutan hujan tropis tidak mampu beradaptasi terhadap ancama kebakaran hutan. Hal itu disebabkan kulit pepohonan yang tipis dibandingkan dengan jenis pepohonan di area hutan lain.[176]

Jika merunut ke dalam sejarah, Indonesia tercatat mengalami tiga peristiwa kebakaran hutan secara masif. Peristiwa tersebut antara lain terjadi pada tahun 1982-1983, 1994 serta 1997-1998. Secara keseluruhan, peristiwa kebakaran hutan tersebut diakibatkan oleh fenomena iklim El Nino, dimana terjadi gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di sekitar area garis khatulistiwa pasifik (*equatorial pasific*). Penyimpangan

---

[174]*Ibid.,* hal. 60
[175]*Ibid.,* hal. 64
[176] *Ibid.,* hal. 64

kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang berujung pada penyimpangan iklim.[177] Ketika fenomena El Nino terjadi, kondisi perairan di wilayah Indonesia justru mengalami penurunan suhu yang mengakibatkan perubahan pada massa udara serta berdampak pada berkurangnya awan-awan hujan di Indonesia. Dampak terbesar dari El Nino di Indonesia adalah terjadinya kemarau besar yang diakibatkan rendahnya tingkat curah hujan di musim panas.[178]

Jika dilihat kembali, fenomena kebakaran hutan akibat El Nino tersebut terjadi pasca dimulainya era industrialisasi lahan hutan di masa Orde Baru. Peristiwa kebakaran hutan masif pertama yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1983 menghancurkan 210.000 kilometer persegi dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur.[179] Ironisnya, Kalimantan Timur sendiri merupakan titik pusat dari ledakan produksi kayu di Indonesia. Buruknya praktik penebangan hutan terlihat dari akumulasi limbah pembalakan dalam jumlah besar di area hutan. Akibatnya, terbentuk lapisan vegetasi bawah tanah yang padat dan mudah terbakar dibanding lapisan tanah pada kawasan hutan hujan umumnya.[180] Kekeringan akibat El Nino sendiri terjadi antara bulan Juni 1982 dan Mei 193. Dalam periode tersebut, kebakaran telah menghabiskan hingga 3,2 juta ha lahan dimana 2,7 juta ha adalah hutan hujan tropis.[181] Diperkirakan biaya kerugian akibat kebakaran sebesar 9

[177] "Sejarah Dampak El Nino Di Indonesia", http://www.bmkg.go.id/, diakses pada 2 Juli 2016.
[178] "Sejarah Dampak El Nino Di Indonesia", *loc.cit.*
[179] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 61
[180] *Ibid.*, hal. 61
[181] *Ibid.*, hal. 62

miliar Dollar, dengan hampir 8,3 miliar Dollar berasal dari hilangnya tegakan pohon (Hess, 1994).[182]

Peristiwa kebakaran hutan berikutnya kembali terjadi di Kalimantan Timur dengan luas area hingga mencapai 5 juta ha pada tahun 1994 (BAPPENAS, 1999).[183] Peristiwa ini juga mulai mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Transportasi udara dan laut mulai terganggu, terutama di Singapura dan Malaysia.[184] Selain itu, tingkat polusi udara juga kian meninggi. Pada periode ini pemerintah Indonesia beserta ASEAN dan lembaga-lembaga internasional lain mulai berfokus pada program yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Isu ini mulai dibahas dan diangkat sebagai suata masalah regional (UNDP, 1993).[185]

Namun demikian, fenomena El Nino yang terjadi pada periode 1997 hingga 1998 melahirkan bencana kebakaran hutan terbesar di Indonesia. Sebanyak 10 juta ha lahan terkena dampak kebakaran dengan kerugian diperkirakan mencapai hampir 10 miliar Dollar.[186] Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran ini membuat sebagian besar kawasan Asia Tenggara berkabut hinga beberapa bulan.[187] Pada peristiwa ini juga mulai ditemukan kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.[188] Pembakaran tersebut berkaitan dengan usaha pembukaan lahan perkebunan di area hutan, terutama perkebunan kelapa sawit. Selain dikarenakan rendahnya biaya pembukaan lahan yang dikeluarkan,

[182] *Ibid.*, hal. 62
[183] *Ibid.*, hal. 62
[184] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 62
[185] *Ibid.*, hal. 62
[186] *Ibid.*, hal. 63
[187] *Ibid.*, hal. 63
[188] *ibid.*, hal. 63

pembakaran juga menurunkan kualitas lahan hutan yang berkaitan juga dengan mudahnya pemberian izin konversi lahan menjadi perkebunan.[189]

Selain area hutan yang mengalami kerusakan, lahan gambut yang berada di pulau Kalimantan juga ikut mengalami kerusakan akibat kebakaran liar. Lahan gambut (*peatlands*) sendiri sejatinya merupakan lahan basah yang tercipta dari dekomposisi tidak sempurna tanaman-tanaman purba akibat rendahnya jumlah organisme pengurai.[190] Kalimantan memiliki lahan gambut terluas kedua setelah Sumatra dengan luas sekitar 4.778.004 ha.[191] Lahan gambut yang terletak di pulau Kalimantan mayoritas bertipe ombrogen, dimana pembentukannya lebih ditentukan oleh air hujan yang mempunyai efek pencucian (bleaching) sehingga miskin mineral.[192] Kondisi tersebut membuat lahan gambut di Kalimantan terbilang tidak produktif melihat tingkat kesuburannya yang rendah.

Di masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto mencanangkan Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar bertempat di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.[193] Proyek tersebut dilakukan dengan mengeringkan lahan gambut yang tersedia. Tindakan tersebut menjadi bentuk perusakan lingkungan dimana lahan gambut memiliki karakteristik tidak dapat kembali (irreversible). Akibatnya, tanah tidak dapat menyerap air dengan baik.[194] Selain itu, lahan gambut menyimpan

---

[189] "Hubungan Kebakaran Hutan Dengan Kelapa Sawit: Mengapa Masyarakat Melakukan Pembakaran?" *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 64
[190]"Lahan Gambut", https://jurnalbumi.com/, diakses pada 2 Juli 2016
[191]"Daftar Daerah yang Memiliki Jumlah Lahan Gambut Terluas" , http://jokowarino.id/, diaskes pada 2 Juli 2016
[192]"Lahan Gambut", *loc.cit.*
[193] Lahan Gambut", *loc.cit.*
[194]"Lahan Gambut", *loc.cit.*

cadangan karbon sebanyak 75% dari jumlah karbon yang tersebar di atmosfer. Apabila lahan gambut kering mengalami kebakaran, cadangan karbon tersebut akan terlepas ke udara dan menyulitkan proses pemadaman.[195] Proyek PLG sendiri pada akhirnya terbengkalai dan meninggalkan kerusakan ekosistem di lahan gambut kering. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kegagalan proyek PLG dapat dilihat dari tingginya tingkat kebakaran yang melanda lahan gambut, serta hilangnya beberapa jenis tanaman seperti kayu rotan dahanen dan ahas.[196]

3.2.4 Penyalahgunaan Hutan Tanaman Industri

Pengertian Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, adalah "hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan".[197] Program HTI ditetapkan sebagai rencana menyediakan pasokan tambahan kayu yang berasal dari hutan-hutan alam, melakukan rehabilitasi lahan yang terdegradasi dan mempromosikan konservasi alam. Para pengusaha HTI menerima sejumlah bentuk subsidi dari pemerintah, termasuk pinjaman lunak dari "Dana Reboisasi" yang dikumpulkan dari pemegang HPH.[198]

---

[195] "Lahan Gambut", *loc.cit.*

[196] "Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?", http://www.mongabay.co.id/, diakses pada 2 Juli 2016

[197] "Hutan Tanaman Industri", https://jurnalbumi.com/, diakses pada 2 Juli 2016

[198] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 41

Kawasan HTI diarahkan untuk dibangun di kawasan hutan alam yang sudah tidak produktif lagi. Kementerian Kehutanan menentukan tiga kriteria hutan alam yang sudah tidak produktif lagi, antara lain: (1) pohon berdiameter kurang dari 20 cm tidak lebih dari 25 batang/ha; (2) pohon induk kurang dari 10 batang/ha; (3) kemampuan permudaan alamnya telah menurun.[199]

Pemberian izin HTI hanya diperuntukkan bagi produksi kayu pulp dan kayu pertukangan. Di tahun 2000, tercatat sekitar 7,8 juta ha telah dialokasikan untuk semua tipe pembangunan HTI, tetapi hanya 23,5 persen dari kawasan tersebut yang benar-benar ditanami.[200] Angka tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam sistem HTI. Meski dalam peraturannya HTI hanya boleh dibangun di kawasan hutan alam non-produktif, dalam prakteknya konsesi HTI sering dibangun di lahan hutan yang produktif. Dalam hasil studi kelayakan perusahaan HTI Juni 1998, 22% lahan yang berstatus HTI merupakan lahan hutan alam produktif (Kartodiharjo & Supriono, 2000:4).[201]

Alasan ekonomi dapat menjadi faktor dibalik kasus penyalahgunaan izin HTI diatas. Pembangunan HTI di lahan yang telah mengalami degradasi akan lebih mahal karena dibutuhkan investasi besar untuk kegiatan penyiapan lahan hingga rehabilitasi kesuburan tanah.[202] Selain itu, izin HTI yang mencakup Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) meninggalkan lubang hukum dimana HTI yang dibangun

---

[199] "Hutan Tanaman Industri", *loc.cit.*
[200] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 41
[201] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 41
[202] *Ibid.*, hal. 42

di area hutan alam produktif dapat memberikan keuntungan pasokan kayu yang lebih besar.[203]

Kurang dari seperlima dari 2 juta ha yang dialokasi untuk HTI kayu pertukangan telah direalisasikan penanamannya, sedangkan realisasi penanaman di lahan HTI untuk produksi kayu pulp lebih besar, yakni sekitar seperempat kawasan sebesar 5 juta ha yang dialokasikan.[204] Dilihat dari rendahnya jumlah kawasan HTI yang telah dibangun, dapat diketahui bahwa terdapat penyalahgunaan izin HTI, dimana pertumbuhan luas areal konsesi HTI didorong oleh subsidi finansial yang besar dan hak untuk menebang habis pohon yang masih berdiri.[205]

Tingginya realisasi penanaman HTI untuk produksi kayu pulp diatas juga didorong dari meningkatnya industri pulp dan kertas pada dekade 1990-an. Terdapat peningkatan produksi pulp dari 1 juta ton di tahun 1990 menjadi 5 juta ton pada tahun 2000.[206] Akibatnya, alokasi dan penanaman aktual HTI untuk produksi kayu pulp melebihi kapasitas panen areal HTI.

Salah satu penyebab tingginya hasil produksi dari industri pulp tersebut antara lain biaya operasional tetap yang terbilang tinggi. Sebagian besar fasilitas investasi modal awal pabrik pulp berjumlah antara 600 juta Dollar dan 1,3 miliar Dollar. Tingginya biaya tersebut membuat produsen pulp cenderung menjalankan pabriknya secara simultan dan hampir mendekati kapasitas penuh.[207] Kebutuhan

[203] *Ibid.*, hal. 42
[204] *Ibid.*, hal. 42
[205] *Ibid.*, hal. 42
[206] *Ibid.*, hal. 44
[207] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 44

produksi satu ton pulp sendiri membutuhkan antara 4,9 hingga 5,4 meter kubik kayu bulat. Maka, rata-rata kebutuhan kayu untuk produksi selalu lebih banyak dari pasokan kayu legal. Terhitung 85 persen kebutuhan kayu untuk industri pulp masih berasal dari konversi hutan alam.[208] Sebuah studi memperkirakan bahwa produksi pulp secara langsung mengakibatkan deforestasi sekitar 835.000 ha antara tahun 1988 sampai 1999.[209] Beberapa pabrik pulp di Indonesia diketahui memiliki jenjang besar antara konsumsi kayu untuk bahan baku pulp dengan jumlah panen kayu yang tersedia di kawasan HTI.

3.2.5 Pembukaan Lahan

Transmigrasi, program jangka panjang pemerintah untuk memukimkan kembali penduduk dari Jawa dan Bali yang memiliki tingkat kepadatan tinggi ke Sumatera, Kalimantan dan kawasan lainnya, telah membuka 1,7 juta ha lahan pertanian dan memindahkan sekitar 8 juta orang antara tahun 1969 dan 1993.[210] Beberapa periode waktu telah membagi fase-fase transmigrasi. Periode 1960-an hingga 1980-an, transmigrasi difokuskan pada pengembangan pertanian subsisten.[211] Pola ini membagikan lahan pertanian seluas 2 ha kepada tiap rumah tangga transmigran. Sedangkan dalam periode tahun 1990-an hingga akhir program transmigrasi di tahun 1999, terjadi pergeseran fokus ke arah penyediaan tenaga buruh untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit.[212]

[208] *Ibid.*, hal. 45
[209] *Ibid.*, hal. 45
[210] *Ibid.*, hal. 58
[211] *Ibid.*, hal. 58
[212] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 58

Pulau Kalimantan sendiri merupakan salah satu fokus pengarahan transmigran oleh pemerintah pusat, terutama pada era Orde Baru. Tercatat antara tahun 1971 hingga 1980, lebih dari 100.000 transmigran menjajaki Kalimantan.[213] Sesudah tahun 1980, program transmigrasi lebih digalakkan dengan hasil lonjakan jumlah transmigran di provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 180.000 tiap dekadenya.[214]

Dalam mekanismenya, program trasmigrasi mencakup Perkebunan Inti Rakyat yang melibatkan kerjasama antara perusahaan swasta kelapa sawit dan keluarga transmigran. Setiap rumah tangga menerima lahan seluas 3 ha, dimana 2 ha dibangun untuk perkebunan kelapa sawit.[215] Selain itu, terdapat pula pola HTI yang melakukan tukar guling lahan kepada keluarga transmigran, dimana lahan yang diberikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak transmigran. Terhitung sebanyak 39 persen kawasan HTI yang telah ditanami terletak di lokasi transmigrasi.[216]

Mekanisme pembagian lahan tersebut membuat pembukaan lahan di area hutan tropis menjadi tidak terhindarkan. Hingga tahun 1998, sebanyak 300.000 ha lahan hutan tropis di Kalimantan telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan hunian demi pencapaian target program transmigrasi.[217] Pada pertengahan tahun 1980-an

---

[213] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 38
[214] *Ibid.,* Hal. 58
[215] *Keadaan Hutan Indonesia*. *Op.cit.*, hal. 58
[216] *Ibid.,* Hal. 58
[217] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 38

sejumlah LSM internasional mengatakan bahwa program transmigrasi bertanggungjawab atas sejumlah besar deforestasi di Indonesia.[218]

Terkait program transmigrasi yang dipaparkan diatas, terdapat juga fenomena lanjutan yang berhubungan dengan pembukaan lahan, antara lain pertanian skala kecil dan perladangan berpindah. Walaupun fenomena tersebut tidak memiliki pengaruh secara masif terhadap deforestasi dibanding industrialisasi hutan, namun tetaplah menjadi subjek kontroversial. Fenomena peladangan berpindah termasuk salah satu yang banyak dibahas terkait faktor penyebab deforestasi. Di tahun 1990, World Bank memperkirakan bahwa dari laju deforetasi tahunan yang sebesar 700.000 hingga 1.200.000 ha, sekitar 350.000 hingga 650.000 ha dilakukan oleh konversi lahan oleh petani kecil (World Bank 1990:xxi).[219] Pernyataan World Bank sendiri mengacu pada penelitian J. Dick (1991) yang menyatakan bahwa program-program yang disponsori pemerintah (transmigrasi, perkebunan, kegiatan pembalakan) menyebabkan 67% dari semua deforestasi.[220]

3.3 Dampak Terjadinya Deforestasi

Secara keseluruhan, dampak dari deforestasi terbilang luas. Hal ini dikarenakan fungsi hutan tropis di pulau Kalimantan sendiri yang sangat penting bagi kehidupan seluruh ekosistem yang hidup di dalamnya. Tidak hanya keanekaragaman flora dan fauna, namun juga kehidupan masyarakat lokal di Kalimantan yang semakin

---

[218] *Laju dan Penyebab Deforestasi Di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya, Op.Cit.*, Hal. 9
[219] *Ibid.*, Hal. 6
[220] *Ibid.,* Hal. 6

terancam dengan fenomena deforestasi. Deforestasi yang diikuti oleh degradasi hutan membuat luas lahan kritis mengalami peningkatan. Hingga tahun 2006, tercatat lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar hutan di Indonesia mencapai 77.806.880 ha dengan tingkat kekritisan dari agak kritis seluas 47.610.080 ha, kritis seluas 23.306.233 ha, dan sangat kritis seluas 6.890.567 ha (Kementerian Kehutanan, 2009). [221]

Pulau Kalimantan sendiri telah kehilangan sekitar lebih dari 13 juta ha area hutan dari tahun 1985 hingga 2002. Jumlah tersebut terhitung tiga kali lebih besar dari luas negara Swiss.[222] Diperkirakan rata-rata deforestasi tahunan di Kalimantan antara tahun 1985 hingga 1997 tiga kali lebih besar dari tingkat kehilangan hutan di seluruh kawasan Asia Tenggara.[223]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Pertanian melalui metode citra langsat di tahun 2000, 2003 dan 2006 terlihat bahwa luas tutupan lahan hutan terus mengalami penurunan.[224] Bentuk-bentuk kerugian dari fakta tersebut antara lain: (1) hutan lindung tidak bisa lagi berfungsi menjaga konservasi tanah dan air, (2) peresapan air hijan ke dalam tanah berkurang sehingga pada musim kemarau terjad pengeringan sumber air, (3) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat deforestasi yang terjadi tidak dapat terkendali atau sekedar ditanggulangi, (4) adanya konflik sosial antara masyarakat lokal yang memiliki adat istiadatnya

---

[221] Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, *Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air*, Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010, Hal. 74.
[222] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 69
[223] *Ibid.,* hal. 69
[224] *Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air*, *Op.cit.*, hal. 76

sendiri terganggu dengan pelaku-pelaku deforestasi, baik badan-badan usaha besar ataupun petani transmigran tingkat kecil.[225]

3.3.1 Dampak Terhadap Perubahan Iklim

Maraknya pembakaran dan pengeringan lahan gambut di Kalimantan dapat menyebabkan tingginya angka pelepasan emisi karbon ke udara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tanah di lahan gambut memiliki kandungan karbon dengan jumlah tinggi dan mudah terlepas ke atmosfer melalui pembakaran dan pengeringan. Gas karbon yang terlepas ke atmosfer akan mengurai kandungan gas rumah kaca seperti ozon yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dalam laporan tahun 2000, diperkirakan ada sejumlah dampak dari perubahan iklim, antara lain peningkatan suhu rata-rata, peningkatan intensitas curah hujan yang meninggikan resiko banjir, terancamnya keamanan pangan pada bidang pertanian, naiknya permukaan air laut yang mengancam kawasan kepualuan, meningkatnya suhu air laut yang dapat merusak biota kelautan dan terumbu karang, serta merebaknya tipe-tipe penyakit yang berkembang biak lewat air dan vektor.[226]

3.3.2 Terancamnya Keanekaragaman Satwa

Pulau Kalimantan telah menjadi habitat raksasa bagi banyak jenis spesies fauna eksklusif, seperti orangutan, siamang, gajah Kalimantan, macan tutul, beruang

---

[225] *Ibid.*, hal. 76.

[226] "Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia", http://www.downtoearth-indonesia.org/, diakses pada 3 Juli 2016

madu serta burung rangkong (*hornbill*). Tercatat antara tahun 1994 dan 2004 setidaknya telah ditemukan sebanyak 361 jenis spesies fauna baru dan terus bertambah hingga saat ini.[227]

Salah satu spesies fauna yang ikonik sekaligus mengalami keterancaman dari kepunahan adalah orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Dapat dikatakan bahwa orangutan menjadi penghubung erat antara dampak deforestasi dengan terancamnya keanekaragaman fauna di Kalimantan. Hal ini dikarenakan tingginya ketergantungan keberlangsungan hidup orangutan dengan hutan tropis yang menjadi habitatnya. Saat ini, sekitar lebih dari 40.000 orangutan tersisa di Kalimantan, dengan provinsi Kalimantan Tengah menjadi pusat konsentrasi tertinggi.[228] Dalam penelitian di tahun 2003 terlihat bahwa Kalimantan telah kehilangan setidaknya 39 persen habitat orangutan dalam kurun waktu sepuluh tahun (1992-2002).[229] Studi lain juga menemukan bahwa habitat orangutan yang tersisa hanya dapat menampung hingga 50 ekor hewan, dan terus berkurang. Sedangkan daya tampung habitat yang dibutuhkan minimal lebih dari 250 ekor, guna memastikan stabilitas kehidupannya.[230]

Orangutan sendiri secara alamiah merupakan hewan vulnerable, tanpa harus mengalami deforestasi. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat reproduksitas yang disebabkan oleh lambatnya proses pendewasaan seksual (sekitar 12 tahun) dan jarak pembuahan yang panjang (sekitar 8 tahun).[231] Namun, terdapat sebanyak

---

[227] *Borneo: Treasure Island At Risk*, *Op.cit.,* hal. 15
[228] *Ibid.,* Hal. 16
[229] *Ibid.,* Hal. 17
[230] *Ibid.,* Hal. 17
[231] *Ibid.,* Hal. 17

delapan faktor utama yang membawa orangutan kedalam kepunahan, antara lain pembalakan liar, konversi lahan hutan, pencurian hewan, penambangan, pengeringan lahan gambut dan buruknya manajemen hutan.[232]

Pencurian dan perdangan hewan ilegal juga menjadi isu utama atas terancamnya keberagaman fauna di Kalimantan. Bisnis pencurian hewan di Indonesia sendiri terbilang besar dengan pemasukan hingga 1,1 miliar Euro/tahun.[233] Tiga spesies asal Kalimantan diketahui memiliki harga mahal, yakni macan tutul, beruang madu dan orangutan. Konservasi Satwa Bagi Kehidupan (kini ProFauna Indonesia) melaporkan penemuan pasar gelap hewan dilindungi dimana terdapat 14 beruang hidup beserta 100 cakar beruang, 47 taring beruang, serta 37 kandung kemih beruang; sebuah komoditi yang dicari di pasar tradisional Tiongkok untuk pembuatan obat. Adapun macan tutul banyak diburu dan diperdagangkan untuk dicari gigi dan kulitnya.[234]

Sedangkan kasus yang terjadi terhadap orangutan terbilang lebih kompleks dibanding spesies lainnya. Rendahnya tingkat perkembangbiakan orangutan membuat angka perburuan yang berkisar di satu persen/tahun saja dapat mengancam populasi besar yang tinggal di habitat luas. Bahkan di habitat terbaiknya, orangutan tidak mampu bertahan dalam tingkat perburuan diatas dua persen saja. Hal tersebut membuat toleransi kematian orangutan sangat rendah. Ditambah dengan peningkatan angka perburuan membuat pencurian hewan dan

[232] *Ibid.,* Hal. 17
[233] *Ibid.,* Hal. 66
[234] *Ibid.,* Hal. 66

perdagangan ilegal menjadi ancaman terbesar setelah kehancuran habitatnya. [235] Namun demikian, kasus pencurian dan perdagangan orangutan ilegal tetap terjadi, bahkan hingga abad 20. Di tahun 2003, TRAFFIC menyatakan bahwa terhitung 30 orangutan ilegal tiap tahunnya diperjualbelikan terutama di pasar gelap di Jawa. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa industri gelap perdagangan satwa ilegal juga berkaitan dengan praktik pelanggaran hukum lainnya, termasuk didalamnya perdagangan kayu ilegal, serta konversi lahan hutan ilegal. Dalam kasus yang terjadi di Kalimantan pada umumnya, perburuan ilegal dilakukan di daerah dimana terdapat kemudahan aksesibilitas (contoh: kawasan yang memiliki jalur penebangan).[236] Rendahnya penegakan hukum juga ditambah rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap orangutan, membuat habitat orangutan terancam menuju kepunahan.[237]

3.4 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Deforestasi

Maraknya kasus deforestasi di Kalimantan membuat instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk turut campur dalam usaha pengurangan laju deforestasi. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui penerbitan sejumlah peraturan daerah yang bersifat pelarangan terhadap segala bentuk deforestasi, terutama pembakaran hutan. Fenomena pembakaran hutan sendiri merupakan contoh bentuk deforestasi yang paling banyak dilakukan di Kalimantan.

---

[235] *Ibid.,* Hal. 67
[236] *Ibid.,* Hal. 67
[237] *Ibid.,* Hal. 67

Selain adanya faktor alam seperti El Nino, kegiatan pembukaan lahan juga menjadi alasan dibalik aktivitas pembakaran hutan. Murahnya ongkos pembukaan lahan membuat pembakaran menjadi marak dilakukan oleh petani-petani kecil.

Salah satu daerah di Kalimantan yang aktif dalam usaha penanggulangan deforestasi adalah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Di tahun 2003, Kalteng resmi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dengan tujuan mengendalikan dampak pencemaran udara akibat kebakaran lahan dan hutan.[238] Perda ini menjadi bentuk usaha pertama pemerintah daerah di Kalimantan dalam menanggulangi deforestasi. Perdatersebut tidak melarang bentuk aktivitas pembakaran hutan/lahan secara menyeluruh, dimana terdapat dua aktivitas pembakaran lahan yang masih diperbolehkan dengan pembatasan tertentu. Aktivitas pembakaran tersebut antara lain: (1) pembakaran lahan dan hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa; (2) kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan/atau kebun.[239] Batasan-batasan dari aktivitas tersebut antara lain adanya kewajiban membuat izin dari pejabat berwenang, serta pemberlakuan sanksi hukum apabila kegiatan pembakaran dilakukan diluar dari areal ladang.[240] Usaha pemda Kalteng terkait pembakaran hutan kemudian mencapai eskalasi dengan perilisan Instruksi Gubernur No.

---

[238] Muhajir, Mumu, 2010. *Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah*. Kertas Kerja Epistema No.06/2010, Jakarta: Epistema Institute, Hal. 23

[239]*Ibid.*, Hal. 24

[240] *Ibid.*, Hal. 24

364/1337/DISTAN tanggal 6 Agustus 2007 yang secara tegas melarang seluruh aktivitas pembakaran hutan, lahan dan pekarangan tanpa kecuali. Kebijakan tersebut dapat dikatakan menjadi langkah maju Kalteng dalam usaha penghentian deforestasi serta sangat pro lingkungan hidup. Hal tersebut mengingat pada dekade 2000-an isu lingkungan hidup menjadi sorotan publik ketika Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggara Konvensi Agenda Kerja PBB dalam Perubahan Iklim (*United Nations Framework* Convention *on Climate Change/UNFCCC*). Namun di sisi lain, terdapat konsekuensi berat terhadap masyarakat lokal, terutama peladang berpindah yang memakai metode pembakaran lahan. Larangan tersebut membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Aturan tersebut memberikan imbas kepada laju ekonomi masyarakat lokal yang mengalami penurunan setahun setelah pemberlakuan peraturan diatas.[241]

Melihat hal tersebut, Pemda Kalteng melalui gubernur yang menjabat saat itu, Agustin Teras Narang, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng No. 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalteng.[242] Dalam aturan baru tersebut dijelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran diperbolehkan, namun secara selektif dan terkendali melalui izin dari aparat pemerintah, yakni Bupati/Walikota.[243] Secara garis besar, Pergub yang dikeluarkan tersebut lebih diperuntukkan bagi petani atau penggarap lahan kecil, dimana pembukaan lahan maksimal antara 10 hingga 100 ha, tergantung dari luas

---

[241] "Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah", http://terokaborneo.com/, diakses pada 4 Juli 2016

[242] *Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah*, *Op.cit.*, Hal. 25

[243] *Ibid.,* Hal. 25

kepemilikan lahannya.[244] Aturan tersebut kembali diubah dengan Pergub Kalteng No. 15 Tahun 2010 dengan isi yang serupa beserta penambahan satu pasal terkait standar pemberian izin pembukaan lahan. Peraturan tersebut diharapkan dapat menaikkan perekonomian Kalteng serta menjaga tradisi bercocok tanam dan berladang di masyarakat lokal.

Dalam perjalanan di tahun-tahun berikutnya, pergub yang beredar tersebut justru dianggap sebagai sumber polemik terkait aktivitas deforestasi di Kalimantan, terutama melalui pembakaran lahan. Dalam kasus kebakaran hutan di tahun 2015, tercatat sebanyak 172 titik panas di Kalteng sejak bulan Januari hingga Juni 2015 dan tersebar di tiga kabupaten (Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Pulang Pisau) dan satu kotamadya (Palangka Raya).[245] Sedangkan di provinsi Kalimantan Timur, ditemukan 257 titik panas di Kaltim dan Kalimantan Utara selama tahun 2015.[246] Pasca terjadinya kasus kebakaran hutan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Hadi Prabowo, Gubernur Kalteng yang tengah menjabat, agar merevisi Pergub No. 52 Tahun 2010. Hal itu dikarenakan adanya pasal yang memperbolehkan masyarakat untuk membuka lahan melalui pembakaran. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, yang meminta pencabutan Pergub tersebut karena situasi yang berjalan telah berbeda.[247] Adapun Teras Narang, selaku pejabat yang menerbitkan Pergub

---

[244] Sebagai catatan, peladang atau masyarakat yang ingin membakar lahan harus mendapatkan izin dari ketua RT jika luasnya 0,1 ha, dari kepala desa jika luasnya antara 0,1 – 0,5 ha dan dari Camat jika lahannya 0,5-2,5 ha (Mujiar 2010: 25).

[245] "Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah", http://nationalgeographic.co.id/, diakses pada 4 Juli 2016

[246] "Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah", *Loc.cit*.

[247] "Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah", *Loc.cit.*

tersebut mengatakan bahwa aturan itu diterbitkan dengan mempertimbangkan budaya lokal. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat Kalteng setelah panen adalah dengan membersihkan lahan bekas bercocok tanam dengan cara dibakar.[248] Ia pun menegaskan bahwa Pergub tahun 2008 dan 2010 hanya mengikat pada masyarakat dan tidak bagi perusahaan, mengingat aturan pembukaan lahan bagi perusahaan diatur oleh Undang-Undang.[249] Selain itu, Teras Narang juga menganggap aturan yang dibuatnya berjalan efektif dengan berkurangnya aktivitas kebakaran hutan dan kabut asap selama ia menjabat.

Pergub tahun 2010 tersebut dapat dikatakan multitafsir, dimana terdapat pasal yang melegalkan pembakaran lahan dan/atau hutan seluas 0,1 ha hanya dengan bermodalkan surat izin dari kepala RT setempat.[250] Namun di sisi lain, pembakaran hutan di Kalimantan tidak hanya dilakukan oleh petani/peladang, namun juga perusahaan perkebunan besar, terutama kelapa sawit. Dapat diduga bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki modal besar mampu mendapat izin pembakaran lahan dengan mengatasnamakan masyarakat petani.

---

[248] "Ini Penjelasan Eks Gubernur Kalteng Soal Pergub Izin Bakar Hutan", http://news.detik.com/, diakses pada 4 Juli 2016

[249] "Ini Penjelasan Eks Gubernur Kalteng Soal Pergub Izin Bakar Hutan", *Loc.cit.*

[250] "Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah", *Loc.cit.*

3.5 Reaksi Dunia Internasional Terhadap Deforestasi di Kalimantan

Semenjak kasus kebakaran hutan besar pertama di Indonesia di tahun 1982-1983, isu deforestasi di Indonesia mulai menjadi perhatian dunia internasional. ASEAN, organisasi kerjasama regional Asia Tenggara, merupakan salah satu yang cukup vokal mengangkat isu deforestasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pembakaran lahan dan hutan di pulau Kalimantan. Hal ini dapat dikarenakan besarnya pengaruh kabut asap dari sisa pembakaran lahan yang dilepaskan ke udara. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sendiri banyak melempar kritik terhadap pemerintah Indonesia atas banyaknya kasus bencana kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan, antara lain Malaysia dan Singapura.

Langkah awal ASEAN dalam usaha pengurangan laju deforestasi adalah melalui diluncurkannya *Kuala Lumpur Accord on Environment and Development* yang ditandatangani oleh seluruh Menteri Lingkungan Hidup Asia Tenggara pada tanggal 19 Juni 1990. Perjanjian ini menyatakan perlunya kerjasama negara-negara ASEAN dalam mencegah pencemaran lalu lintas batas.[251] ASEAN kemudian kembali terlibat dalam pencegahan bahaya deforestasi pasca kebakaran hutan di Indonesia tahun 1994, dengan mengadakan pertemuan informal AMME (*ASEAN Ministerial Meeting on Environment*) di Kuching, Malaysia, pada tahun 1994.[252]

[251] "The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development Issued by The ASEAN Ministers for the Environment at The Fourth ASEAN Ministers for the Environment Meeting", http://environment.asean.org/, diakses pada 4 Juli 2016

[252] "ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution", http://environment.asean.org/asean-cooperation-on-transboundary-haze-pollution/, diakses pada 4 Juli 2016

Pertemuan tersebut kemudian berlanjut menjadi *ASEAN Meeting on the Management of Transboundary Pollution* di Kuala Lumpur, Juni 1995. Pertemuan tersebut akhirnya melahirkan sebuah agenda kerjasama dalam usaha mencegah polusi lintas batas berupa *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution*. Dalam agenda kerja tersebut terdapat tiga program utama yang direncanakan, antara lain *Transboundary Atmospheric Pollution*, *Transboundary Movement of Hazardous Wastes*, serta *Transboundary Ship-borne Pollution*.[253]

Adanya upaya dari pihak ASEAN dalam mencegah deforestasi beserta dampak luasnya juga menjadi sorotan organisasi lingkungan hidup internasional lain. Greenpeace, salah satu organisasi advokasi lingkungan global, menuntut negara-negara ASEAN untuk mengambil posisi tegas dalam pencegahan deforestasi dan perubahan iklim. Pernyataan tersebut dikeluarkan Greenpeace pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bangkok, Thailand, pada tahun 2009.[254] Dalam siaran pers yang dirilis tanggal 1 Maret 2009, Greenpeace mengkritik para pemimpin ASEAN karena tidak segera mengambil tindakan untuk melindungi 283 juta hektar hutan di wilayah ASEAN. “Deforestasi global bertanggungjawab atas sekitar 20% emisi gas rumahkaca. Untuk menghentikan bencana perubahan iklim, menghentikan deforestasi adalah hal yang mendesak”, demikian ditegaskan Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.[255] Selain itu, Greenpeace juga menuntut ASEAN untuk secara tegas melaksanakan kebijakan nol

---

[253] “ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution”, *Loc.cit.*
[254] “Greenpeace : Melindungi hutan ASEAN dapat mencegah perubahan iklim”, http://www.greenpeace.org/, diakses pada 4 Juli 2016
[255] “Greenpeace : Melindungi hutan ASEAN dapat mencegah perubahan iklim”, *Loc.cit.*

deforestasi (*zero deforestation*) di kawasan hutan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. “Kesepuluh negara di kawasan ini harus setuju menerapkan kebijakan zero deforestasi untuk melindungi hutan”, kata penasehat politik Greenpeace untuk Asia Tenggara, Zelda Soriano.[256]

[256] “Greenpeace Tuntut ASEAN Terapkan Zero Deforestasi“, https://tempo.co/, diakses pada 4 Juli 2016

BAB IV

UPAYA WWF INDONESIA MELALUI KERANGKA KERJA HoB INITIATIVE DALAM MENANGGULANGI DEFORESTASI DI KALIMANTAN

Keterlibatan WWF Indonesia melalui kerangka kerja Heart of Borneo (HoB) Initiative dalam usaha penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan menjadi konsentrasi utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adanya bentuk-bentuk kerjasama yang berlangsung dalam kegiatannya, baik antar-negara seperti yang terlihat dari peresmian HoB yang dilakukan oleh tiga negara, hingga adanya kerjasama antara pemerintah dan Organisasi non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*/NGO) melalui pendirian Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) HoB antara pemerintah dan WWF-Indonesia, memperlihatkan bahwa isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik dalam tingkat nasional hingga Internasional.Hal ini juga menjelaskan bagaimana isu lingkungan hidup dapat mempengaruhi bentuk-bentuk kerjasama dan hubungan internasional, terutama yang bersifat multilateral.

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih lanjut upaya-upaya yang dilakukan WWF Indonesia melalui kerangka kerja Heart of Borneo Initiative dalam usahanya menanggulangi deforestasi di pulau Kalimantan. Guna menjelaskan hal tersebut,

terlebih dahulu akan dipaparkan program besar HoB Initiative sebagaimana yang telah disetujui dalam Deklarasi HoB Initiative 2007. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menjelaskan implementasi program besar HoB di Indonesia sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan deforestasi di kalimantan. Penulis akan mengkonsentrasikan pembahasan dalam bab ini kepada kawasan HoB di Indonesia yang meliputi provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

4.1 Program Utama HoB Initiative

Sebagaimana yang telah disetujui dalam deklarasi Heart of Borneo tahun 2007, ketiga negara inisiator HoB Initiative kemudian menyepakati 5 (lima) program utama sebagai rencana aksi strategis pada pertemuan Trilateral Kedua HoB, April 2008.[257] Lima program tersebut antara lain: (1) Pengelolaan kawasan lintas batas negara (*Transboundary management*); (2) Pengelolaan kawasan lindung (*Protected areas management*); (3) Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (*Sustainable natural resources management*); (4) Pengembangan ekowisata (*Ecotourism development*); (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*Capacity building*).[258]

[257] "Sejarah HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-on-track, diakses pada 1 Mei 2017.
[258] "Strategi HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/understanding-heart-of-borneo, diakses pada 1 Mei 2017.

4.1.1 Transboundary Management

Dalam pertemuan Trilateral Kedua HoB di tahun 2008, ketiga negara inisiator menyadari terdapatnya perbedaan pemanfaatan lahan di setiap kawasan perbatasan. Kesadaran tersebut menjadikan pentingnya peningkatan kerjasama lintas batas dalam kegiatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Program *Transboundary Management* bertujuan untuk mengatasi isu-su pengelolaan sumberdaya alam dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal di kawasan perbatasan.[259]

Dalam program tersebut, terdapat beberapa rencana aksi (*action plans*) yang dikembangkan sebagai panduan (*guideline*) bagi setiap negara peserta HoB Initiative. Rencana aksi tersebut meliputi: (1) mengembangkan dan mengkaji ulang *master plan* dan mempertimbangkan inisiatif HoB berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara; (2) merekomendasikan kebijakan yang berdasarkan pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB; (3) menetapkan sebuah mekanisme pembagian informasi secara koheren dan efektif; (4) melaksanakan penelitian dan kajian bersama, terutama di bidang keanekaragaman hayati dan sosial-ekonomi, termasuk penilaian terhadap aspek sosial dan demografi; (5) melaksanakan perencanaan bersama tata ruang kawasan HoB.[260]

---

[259] "Pengelolaan Kawasan Lintas Batas Negara", *Loc.cit.*
[260] *Loc.cit.*

4.1.2 Protected Areas Management

Program pengelolaan kawasan lindung oleh HoB Initiative didasari oleh pentingnya peran kawasan lindung dalam upaya mempertahankan fungsi dan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut menjadikan pentingnya pengelolaan secara efektif melalui konservasi kekayaan keanekaragaman hayati. Program *Protected Areas Management* bertujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan pengelolaan kawasan lindung secara efektif di wilayah HoB dengan penekanan pada perbatasan, dalam upaya melestarikan dan memelihara keanekaragaman hayati hutan serta keterkaitan ekologisnya.[261]

Beberapa rencana aksi yang dikembangkan dalam program tersebut antara lain: (1) identifikasi, penilaian dan penetapan kawasan lindung lintas batas dalam rangka memperkuat pengelolaan kawasan lindung berbasis nilai budaya dan warisan alam, daya serap air serta kekayaan keanekaragaman hayati; (2) mengembangkan dan meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan baku untuk pemantauan dan evaluasi dalam upaya pengelolaan kawasan lindung lintas batas, dan melaksanakan kegiatan pemantauan serta evaluasi bersama; (3) mengembangkan dan meningkatkan sistem dan implementasi program pengelolaan kawasan lindung lintas batas secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku jabatan lainnya; (4) mengembangkan dan meningkatkan berbagai pendekatan guna memperbaiki pengelolaan lahan dan vegetasi di kawasan yang diolah oleh masyarakat lokal, dalam atau berdekatan dengan kawasan lindung; (5) menetapkan

[261] "Pengelolaan Kawasan Lindung", *Loc.cit.*

daftar pokok kawasan lindung dalam kawasan HoB dengan informasi mengenai tujuan pengelolaan, ciri khusus serta badan atau individu yang relevan berdasarkan kategori dari setiap negara; (6) mempromosikan keterhubungan dari setiap institusi di antara kawasan lindung yang berada di kawasan HoB.[262]

Program kerja ini menjadi krusial dalam usaha penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan yang dilakukan WWF Indonesia, terutama yang berkaitan dengan fenomena industrialisasi kawasan hutan seperti yang dijabarkan dalam bab 3. Adanya penekanan terhadap unsur penetapan luas kawasan lindung Heart of Borneo diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan dan penyelewengan dari pemberian izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan antara perusahaan dan pemerintah daerah secara serampangan. Lebih jauh lagi, HoB Initiative juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan lindung sesuai dengan adat dan budaya setempat.

4.1.3 Sustainable Natural Resources Management

Guna menjaga keberadaan tutupan hutan, kekayaan aneka ragam hayati serta fungsinya sebagai menara air bagi kawasan di bawahnya, berbagai bentuk industri kehutanan, pertanian dan industri lainnya perlu dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Program *Sustainable Natural Resources Management* memiliki tujuan untuk mengelola SDA di luar

---

[262] *Loc.cit.*

jejaring kawasan lindung melalui pengembangan dan implementasi pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.[263]

Berdasarkan tujuan program tersebut, rencana aksi yang dikembangkan antara lain: (1) meningkatkan dan memperkuat mekanisme dan panduan yang ada untuk memastikan implementasi praktek terbaik dalam pengelolaan SDA, prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan pendekatan ekosistem dalam pemanfaatan SDA termasuk kehutanan, perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan HoB; (2) pengembangan skema program rehabilitasi dan restorasi pada hutan yang terdegradasi dalam kawasan HoB; (3) mengembangkan kawasan HoB sebagai daerah potensial untuk proyek *Reduction of Emission from Deforestation and Degradation*[264] (REDD).[265]

Program kerja ini menjadi krusial dalam usaha penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan yang dilakukan WWF Indonesia, terutama yang berkaitan dengan fenomena pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*). Seperti yang dideskripsikan dalam bab 3, salah satu dampak buruk dari pembalakan hutan secara liar adalah kerusakan ekosistem lahan secara menyeluruh dan degradasi kualitas lahan. Program yang menitikberatkan pada rehabilitasi lahan serta pengelolaan

---

[263] "Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan", *Loc.cit.*
[264] *Loc.cit.*
[265] *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. (disadur dari "REDD, Apakah Itu?", http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-redd/redd-apakah-itu, diakses pada 1 Mei 2017).

SDA diharapkan dapat meningkatkan kembali kuantitas dan kualitas kawasan hutan dan ekosistem yang berkembang didalamnya.

4.1.4 Ecotourism Development

Sebagai salah satu pilar pengembangan sosial ekonomi, adanya kerjasama antar-negara HoB menjadikan pentingnya mempertimbangkan perencanaan pengembangan ekowisata di setiap negara. Tujuan dari program *Ecotourism Development* adalah untuk mengenal dan melindungi nilai alam yang khusus serta tempat-tempat budaya di kawasan HoB.[266]

Dalam usaha pencapaian tujuan dari program tersebut, rencana aksi yang dipersiapkan meliputi: (1) identifikasi, pengembangan dan promosi program ekowisata lintas batas; (2) mengembangkan jaringan dalam pengelolaan ekowisata yang dikaitkan dengan pengelolaan kawasan lindung; (3) mempromosikan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan HoB.[267]

4.1.5 Capacity Building

Guna meningkatkan kapasitas pengelolaan produk hutan dan pertanian dalan upaya melestarikan hasil alam, dibutuhkan pengembangan kapasitas bagi masyarakat di kawasan HoB. Program *Capacity Building* bertujuan untuk memastikan

---

[266] "Pengembangan Ekowisata", http://heartofborneo.or.id/id/about/understanding-heart-of-borneo, diakses pada 1 Mei 2017.
[267] *Loc.cit.*

implementasi inisiatif HoB yang efektif di seluruh tingkat, baik sektor publik dan swasta serta di tingkat masyarakat lokal.[268]

Rencana aksi yang dikembangkan dalam program ini meliputi: (1) implementasi peningkatan kapasitas nasional tentang konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan air, perencanaan fungsi lahan, sistem informasi geografis, pengelolaan kawasan lindung, rekreasi di alam, pengelolaan ekowisata dan penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan produk hutan yang tidak legal dan berskala internasional, termasuk kayu, hidupan liar dan sumberdaya biologis hutan lainnya; (2) menetapkan hubungan antar institusi riset dan pengembangan, dan mendorong kolaborasi termasuk menyertakan peneliti untuk terlibat dalam upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan di HoB; (3) mempromosikan program kesadaran publik tentang berkurangnya keanekaragaman hayati hutan termasuk produk kayu dan satwa liar; (4) mempromosikan pendidikan dan pemahaman mengenai program HoB.[269]

Masing-masing program kerja yang dijabarkan diatas dapat menjelaskan bagaimana WWF Indonesia, terutama melalui platform inisiatif HoB, memiliki peran penting dalam usaha penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan. Peran WWF Indonesia sebagai *Policies Advocacy* atau advokasi kebijakan, dimana WWF Indonesia terlibat dalam upaya-upaya memberikan bantuan konsultansi, perumusan, perencanaan dan pengawasan dari inisiatif HoB yang turut melibatkan tiga negara.

---

[268] "Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia", *Loc.cit.*
[269] *Loc.cit.*

4.2 Implementasi Program HoB Initiative di Indonesia

4.2.1 Rencana Strategis dan Aksi Nasional HoB

Implementasi dari program besar HoB yang telah ditetapkan pada pertemuan trilateral kedua HoB, April 2008 di Pontianak, Indonesia, kemudian secara rinci dirancang melalui Rencana Strategis dan Aksi Nasional (*National Strategic Plan of Action*). Rencana strategis (selanjutnya disebut Renstra) tersebut merupakan dokumen nasional dari program HoB di Indonesia yang disusun melalui proses sosialisasi dan konsultasi antara setiap Kelompok Kerja HoB di tingkat daerah, dengan difasilitasi oleh Pokjanas HoB. Renstra pertama yang dikeluarkan oleh Pokjanas HoB Indonesia dirilis pada tahun 2009 dengan pengesahan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, M.S. Kaban dan Kepala Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo, Andi Novianto.[270]

Terdapat empat program nasional yang dicanangkan dalam Renstra HoB Indonesia tahun 2009, antara lain:

1. Kerjasama Antar-Provinsi dan Kota/Kabupaten.[271] Sebuah bentuk implementasi dari kerjasama lintas-batas antar-provinsi dalam kawasan HoB, yang terbagi kedalam beberapa lingkup kerja, yakni: (1) penggunaan lahan secara berkelanjutan melalui penentuan batas wilayah konservasi HoB dan perancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasan HoB; (2) pembentukan kriteria dan indikator

[270] "National Strategic Plan of Actions: Bridging Conservation and Sustainable Development in Three Countries", *Heart of Borneo National Working Group*, 2009.
[271] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 22.

pengelolaan SDA berkelanjutan melalui reformasi kebijakan; (3) pembangunan kapasitas SDM melalui partisipasi, kolaborasi, edukasi dan penguatan kesadaran di tingkat masyarakat.[272]

2. Pengelolaan kawasan lindung HoB. Pengimplementasian program ini meliputi penataan ruang kawasan konservasi (Taman Nasional, dll.) kedalam bentuk peraturan terkait konservasi ekosistem dan sumber daya serta peraturan terkait kehutanan. Implementasi tersebut difasilitasi kedalam beberapa poin, diantaranya: (1) advokasi kebijakan perlindungan kawasan konservasi HoB, melalui penguatan status kawasan lindung dan konservasi HoB serta pengembangan kebijakan terkait manajemen kawasan konservasi lintas-batas; (2) pengelolaan kemitraan antar-provinsi/kota/kabupaten, sesuai dengan kerja sama tri-nasional serta kemungkinan peningkatan kerjasama dalam isu internasional; (3) penguatan kebijakan dan pelaksanaan kolaborasi pengelolaan kawasan lindung, termasuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, guna memastikan bahwa hak masyarakat atau akses terhadap dan manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi diprioritaskan pada manajemen HoB; (4) pelibatan sektor swasta/BUMN dalam pengelolaan kawasan lindung, melalui berbagai skema pendanaan dan pemberdayaan masyarakat.[273]

[272] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 23.
[273] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 24.

3. Pengelolaan suber daya alam diluar kawasan lindung.[274] Program ini menjelaskan bagaimana pembangunan yang bersifat *sustainable* perlu mempertimbangkan konsistensi lingkungan dan tanggung jawab sosial. Lingkup tindakan dan rencana strategis HoB adalah memastikan penguatan pengelolaan sumber daya alam di luar kawasan lindung melalui proses berikut: (1) reformasi kebijakan; (2) penggunaan lahan berkelanjutan; (3) pembuatan sistem informasi dan pemantauan.[275]
    - Reformasi kebijakan terkait pengelolaan diluar kawasan lindung terbagi ke dalam beberapa poin aksi penting, seperti pembagian manfaat (*benefit-sharing*) secara adil dari pengelolaan SDA secara berkelanjutan (termasuk diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta perbaikan kualitas zona penyangga kawasan konservasi), pemantauan dan evaluasi kegiatan ekonomi dan mempromosikan kawasan HoB sebagai destinasi ekowisata serta menerapkan program *Reduction of Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) di bawah Konvensi Perubahan Iklim, audit terhadap pemanfaatan hutan alam dan perkebunan kayu di wilayah HoB berdasarkan skema pengelolaan hutan dan sertifikasi hutan lestari yang diakui secara internasional, serta pelaksanaan program

[274] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 25.
[275] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 25.

rehabilitasi dan restorasi lahan dan lahan terdegradasi di wilayah HoB.[276]

- Penggunaan lahan yang berkelanjutan dapat diimplementasikan ke dalam beberapa langkah, antara lain inventarisasi dan kategorisasi konflik pemanfaatan hutan dan lahan di wilayah HoB serta pembuatan mekanisme penyelesaiannya, serta evaluasi perencanaan tata ruang penggunaan lahan di kawasan HoB.[277]
- Pengembangan basis data sumber daya alam kawasan HoB secara akurat guna menjadi acuan yang baik untuk proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini juga berkaitan dengan penguraian kriteria dan indikator pemantauan dan evaluasi sumber daya alam, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sumber daya alam.[278]

4. Penguatan institusi dan pembiayaan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memastikan penguatan kelembagaan, mobilisasi sumber daya dan pembiayaan berkelanjutan untuk manajemen HoB melalui: (1) pemberdayaan kapasitas kelembagaan; (2) reformasi kebijakan sektoral dengan mendorong implementasi desentralisasi dan

[276] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 25.
[277] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 25.
[278] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 26.

devolusi pengelolaan kawasan HoB secara konsisten; (3) promosi pembiayaan berkelanjutan.[279]

- Pemberdayaan kapasitas kelembagaan dirinci kembali dengan beberapa aksi, antara lain pengenalan dan pemahaman dasar hukum untuk wilayah HoB bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di wilayah HoB sesuai dengan prinsip-prinsip Konservasi dan pembangunan berkelanjutan, penentuan hubungan kerja dan prioritas kerja Pokjanas HoB, yakni menyiapkan materi untuk pertemuan Tri-lateral, mengembangkan praktik pengelolaan terbaik dan garis panduan dan mengkoordinasikan pekerjaan kelompok kerja provinsi (hubungan dengan dan antar kantor di provinsi dan kabupaten / kota) dalam pelaksanaan program HoB, evaluasi kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah HoB.[280]
- Pendanaan secara berkelanjutan dapat dibagi kedalam beberapa aksi, antara lain pembiayaan dan penggalangan dana serta mobilisasi sumber daya, serta eksplorasi pembiayaan kreatif dan penggalangan dana melalui *Clean Development Mechanism* seperti yang terdapat dalam Protokol Kyoto (dan perdagangan karbon seperti melalui Mekanisme Pembangunan Bersih di

[279] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 26.
[280] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 26.

bawah kerangka kerja Protokol Kyoto atau mekanisme yang masih dalam pengembangan seperti REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan).[281]

4.2.2 Penetapan HoB Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Sejak bulan Maret 2008, kawasan konservasi HoB telah ditetapkan sebagai salah satu dari 76 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia.[282] Penetapan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah no. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.[283] Penetapan tersebut dapat menjadi contoh bagaimana upaya perlindungan kawasan hijau di pulau Kalimantan dari bentuk deforestasi dan degradasi kualitas hutan. Penetapan KSN tersebut dilakukan karena wilayah HoB dianggap mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan di lintas batas negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah warisan dunia.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sendiri didefinisikan sebagai kawasan budidaya tertentu yang berskala besar dan berperan secara nasional maupun daerah.[284] KSN merupakan kawasan yang didalamnya banyak berlangsung kegiatan yang

---

[281] Action Plan And Strategy, *Ibid.,*hal. 26.
[282] "What is Heart of Borneo?", *Heart of Borneo: Indonesia*, Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo Indonesia, 2009: hal. 29.
[283] "Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL", http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28019/node/1019/peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2008, diakses pada 1 Mei 2017.
[284] *Op.cit.,* Hal. 29.

mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.[285]

Kawasan HoB di Indonesia sendiri secara administratif terletak di tiga provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.[286] Total luas wilayah HoB mencakup areal sebesar 16,8 juta hektar, tersebar di 17 kabupaten dan 96 kecamatan. Luas kawasan tersebut merupakan yang terbesar dari kawasan HoB di negara lainnya seperti Malaysia atau Brunei Darussalam, dimana sekitar 72% lahan didominasi oleh hutan hujan tropis.[287]

4.2.3 Kalimantan Forests and Climate Partnership

Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (*Kalimantan Forests and Climate Partnership*/KFCP) merupakan sebuah bagian dari program kerjasama kemitraan karbon hutan Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership*/IAFCP).[288] Dirintis pada tahun 2010 sebagai salah satu program percontohan penanggulangan deforestasi berbasis REDD di Indonesia, KFCP bertujuan untuk "mendemonstrasikan pendekatan yang lebih kredibel, adil dan

---

[285] *Ibid.,* Hal. 29.
[286] "Berapa Luas Wilayah Heart of Borneo di Indonesia?", *Ibid.,* Hal. 6.
[287] *Ibid.,* Hal. 6.
[288] "Chapter 17: Kalimantan Forests and Climate Partnership, Central Kalimantan, Indonesia", http://www.cifor.org/redd-case-book/case-reports/indonesia/kalimantan-forests-climate-partnership-central-kalimantan-indonesia/, diakses pada 1 Mei 2017.

efektif dalam usaha pengurangan emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, terutama lahan gambut.[289]

Secara total, Pemerintah Australia melalui IAFCP memberikan dana 47 juta Dollar Australia untuk seluruh proyek KFCP guna mendukung empat komponen utama dari target tujuan KFCP, antara lain merehabilitasi hutan rawa gambut, menetapkan program pemantauan dan estimasi emisi gas rumah kaca, melaksanakan mekanisme perdagangan karbon (*carbon trade*) berbasis REDD, serta mengembangkan kapasitas pengelolaan dan teknis REDD di tingkat provinsi, kabupate, kecamatan dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah.[290]

KFCP berbasis di kawasan hutan rawa gambut dan lahan gambut terdegradasi di kawasan Ex-Mega Rice Project (EMRP) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesia. Proyek Beras Mega dimulai pada tahun 1996 dengan tujuan untuk membukukan dan menguras 1,2 juta hektar (ha) hutan rawa gambut yang tidak produktif dan jarang penduduknya untuk mengubahnya menjadi sawah. Setelah penghentian proyek secara resmi pada tahun 1999, daerah tersebut rentan terhadap kebakaran dan oksidasi mikrobiologis sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan.[291]

Komponen utama dari keluaran proyek KFCP adalah untuk menguji pendekatan untuk melestarikan hutan rawa gambut utuh yang tersisa di dalam area proyek, dan merehabilitasi daerah yang terdegradasi. Dari 120.000 hektare yang terdiri dari

[289] "Demonstrating Approaches to REDD+ Lessons from the Kalimantan Forests and Climate Partnership", San Giorgio Group Case Study, Climate Policy Initiative, 2013.
[290] "Project Overview", *Ibid.,* hal. 9.
[291] *Ibid.,* hal. 11.

lokasi proyek KFCP, 15.500 hektare hutan gambut yang terletak di dua blok ditargetkan untuk intervensi rehabilitasi dan konservasi.[292] Intervensi terkait direncanakan untuk membantu meningkatkan tingkat air di seluruh lahan gambut ke tingkat yang hampir alami (rehabilitasi hidrologi), mendukung kelangsungan hidup daerah yang didaur ulang, meminimalkan kejadian kebakaran, dan dengan demikian mendukung penghindaran dan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mempromosikan penyerapan karbon.[293]

[292] *Ibid.,* hal. 11.
[293] "Executive Summary", *Ibid.,* hal. 6.
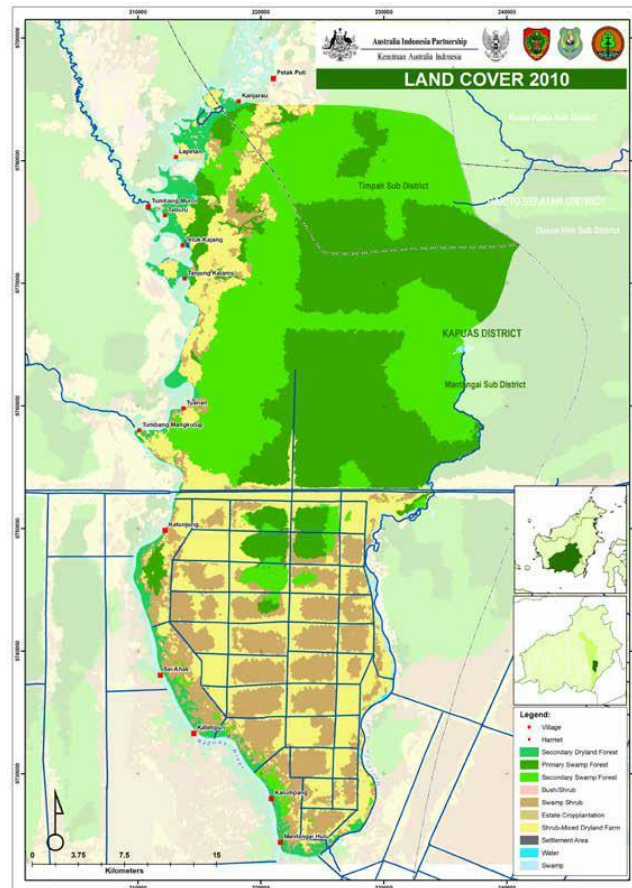
Gambar 4.1: Peta kawasan KFCP[294]

4.2.4 Kaltim Green

Kalimantan Timur, sebagai salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kawasan HoB, turut mengalami efek positif dari upaya yang dilakukan HoB Initiative dalam usaha penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan. Salah satu bentuk positif yang diterima Kaltim adalah munculnya komitmen dari pemerintah daerah seperti yang ditargetkan dalam program besar HoB Initiative serta rencana

[294] Appendix A: Maps of KFCP Site, *Ibid.,* Hal. 38.

aksi yang dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya. Komitmen tersebut terlihat dari penetapan 'Kaltim Green Policy' untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas ramah kaca sebesar 26% di tahun 2020, salah satunya melalui penanaman 14 juta pohon yang didukung oleh 14 kabupaten/kota di Kaltim.[295]

Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai 'Kaltim Green' tersebut mulai dicanangkan pada 7 Januari 2010 oleh Gubernur Kaltim pada periode tersebut, H. Awang Faroek Ishak. Kebijakan 'Kaltim Green' tersebut dirancang dengan beberapa tujuan, antara lain: (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara menyeluruh dan seimbang; (2) mengurangi ancaman bencana ekologi seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan; (3) mengurangi pencemaran dan degradasi kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kaltim; (4) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seluruh pihak baik pemerintah, swasta, serta masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.[296]

Dalam usaha mewujudkan tujuan yang dicanangkan tersebut, kemudian dirancang beberapa langkah yang diterapkan dan dihimbau langsung oleh gubernur, antara lain perluasan area bebas merokok, menggalakkan kembali sepeda hijau, gerakan penghijauan, pengaturan kendaraan bermotor serta pengolahan sampah terpadu.[297]

---

[295] "Minister Supports "Kaltim Green" Policy, http://www.antaranews.com/en/news/67463/minister-supports-kaltim-green-policy, diakses pada 1 Mei 2017.
[296] Program Kaltim Green, http://web.bappedakaltim.com/berita-284-green.html, diakses pada 1 Mei 2017.
[297] Kebijakan-Kebijakan yang Mendukung Kaltim Green, http://www.adityaperdana.web.id/kebijakan-kebijakan-yang-mendukung-kaltim-green.html#ixzz184CdxZW1, diakses pada 1 Mei 2017.

Selain itu, gubernur juga meminta partisipasi swasta untuk ikut merehabilitasi hutan dan lahan kritis. "Kita harapkan pihak swasta membantu mewujudkan program Kaltim Hijau melalui program wajib sesuai hukum Indonesia, yakni tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)," demikian salah satu kutipan dari gubernur Kaltim terkait partisipasi pihak swasta dalam mendukung Kaltim Green.[298] Imbauan dukungan partisipasi kebijakan Kaltim Green ini juga dispesifikasikan pada pengusaha tambang, terutama batubara. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben Kaltim bulan Juni 2010. Para pelaku industri pertambangan batubara di Kaltim harus mampu menjadikan Kaltim sebagai potret pertambangan yang baik di Indonesia dengan cara menerapkan prosedur penambangan secara benar diantaranya dengan melaksanakan prosedur good mining practice dan memahami serta melaksanakan program Kaltim Green atau Kaltim Hijau," demikian kutipan yang diberikan.[299] Pencapaian dari kebijakan Kaltim Green ini terbilang tinggi, dimana tercatat realisasi penanaman bibit pohon baru pengganti hutan terdegradasi telah mencapai 315.981.926 batang hingga tahun 2016.[300]

Kebijakan 'Green Kaltim' ini sendiri juga melibatkan pihak WWF Indonesia sebagai fasilitator. Salah satu keterlibatannya antara lain dengan menyelenggarakan forum diskusi intensif "Inisiatif Parapihak dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi

---

[298] Gubernur Minta Partisipasi Swasta Untuk "Kaltim Green", Antaranews.com, diakses pada 1 Mei 2017.

[299] "Pengusaha Tambang Harus Dukung Kaltim Green", Vivaborneo.com, diakses pada 1 Mei 2017.

[300] "Keren Nih, Kaltim Sudah Tanam 315 Juta Pohon dalam 6 Tahun", http://www.kalamanthana.com/2016/05/23/keren-nih-kaltim-sudah-tanam-315-juta-pohon-dalam-6-tahun/, diakses pada 1 Mei 2017.

Hijau di Kalimantan Timur" pada bulan September 2014. Dalam forum yang dihadiri oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, dan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Rusmadi, MS. tersebut dibahas implementasi ekonomi hijau dan REDD+ di provinsi Kalimantan Timur.[301] "Penerapan ekonomi hijau membutukan kemitraan antar pihak agar keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercipta dalam konsep pembangunan yang rendah emisi," demikian kata CEO WWF-Indonesia, Dr. Efransjah. "WWF-Indonesia melakukan kegiatan dalam kerangka ekonomi hijau di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan peran aktif masyarakat, perusahaan dan Pemkab setempat. WWF-Indonesia mendorong agar kedua Kabupaten tersebut memiliki 'Program Pembangunan Ekonomi Hijau' sebagai strategi yang komprehensif untuk berkontribusi dalam penurunan emisi Provinsi Kalimantan Timur," lanjut Efransjah.[302] Forum tersebut memperlihatkan bagaimana WWF Indonesia turut memfasilitasi kebutuhan pihak Provinsi Kaltim dalam melaksanakan kebijakan 'Kaltim Green' demi usahanya menanggulangi deforestasi di Kalimantan.

---

[301] "Inisiatif Parapihak Dalam Rangka Wujudkan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur", http://www.wwf.or.id/?35403/Inisiatif-Parapihak-Dalam-Rangka-Wujudkan-Ekonomi-Hijau-di-Kalimantan-Timur, diakses pada 7 Agustus 2017.

[302] *Loc.cit.,* diakses pada 7 Agustus 2017.

BAB V
KESIMPULAN

Pulau Kalimantan, sebagai sebuah kawasan dengan luas hutan tropis terbesar di Asia Tenggara mencakup tiga negara yakni Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Pulau Kalimantan sebagai sebuah hutan tropis tentunya memiliki beragam macam keanekaragaman hayati yang secara langsung bermanfaat bagi kelangsungan hidup setiap ekosistem yang berada di dalamnya, baik flora dan fauna hingga masyarakat asli Kalimantan. Namun demikian, adanya fenomena deforestasi hutan yang merupakan prilaku manusia menimbulkan kerusakan jangka panjang bahkan kehancuran permanen terhadap keberlangsungan ekosistem di pulau Kalimantan. Fenomena ini memunculkan isu terkait penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat deforestasi di kawasan pulau Kalimantan melalui berbagai upaya yang menantang, antara lain karena bersifat lintas batas tiga negara yang berada di wilayah tersebut. Tanpa upaya yang terintegrasi antar wilayah, upaya penanggulangan deforestasi di pulau Kalimantan ini akan mengalami persoalan yang cukup pelik. Dan tantangan mengkoordinasikan kebijakan antar tiga negara bukanlah persoalan mudah karena terkadang muncul persoalan masing-masing negara yang lebih mementingkan national interest atau kepentingan nasionalnya masing-masing. Perlunya aktor non-negara yang dapat memainkan peran sebagai *inter-mediating actor* atau aktor yang dapat memediasi antar kepentingan yang muncul dari pada aktor-aktor negara menjadi sangat

penting. Dan inilah yang dilakukan oleh WWF khususnya WWF Indonesia melalui *platform* inisiatif Heart of Borneo.

WWF-Indonesia, sebagai salah satu NGO berbasis pelestarian lingkungan hidup, memiliki peran penting terkait masalah pelestarian lingkungan hidup. Peran tersebut dapat dilihat dari pembentukan Heart of Borneo (HoB) Initiative sebagai sebuah platform alternatif dalam keberlangsungan usaha penanggulangan deforestasi di Kalimantan. Dalam inisiatif tersebut, WWF-Indonesia mampu menunjukkan bagaimana konservasi lintas batas dapat dijalankan dengan membangun kerjasama antara ketiga negara yang berada dalam pulau Kalimantan, guna menjalankan upaya penanggulangan deforestasi hutan di kawasan tersebut. Hal ini juga dibangun melalui strategi WWF yang bersifat kooperatif dan pengerjaan program berbasis kemitraan yang telah berlangsung tidak hanya di pulau Kalimantan, namun juga kawasan lindung lainnya di seluruh dunia.

Dalam pelaksanaan inisiatif HoB sebagai sebuah kerangka kerja, kemudian dirancang sistem koordinasi di setiap negara guna tercapainya visi dan misi HoB. Salah satunya melalui pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) HoB di Indonesia. Dalam Pokjanas tersebut, pemerintah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengerjaan dan pengawasan program yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja HoB di setiap provinsi dan kabupaten/kotamadya yang berada dalam wilayah konservasi yang disetujui tiap negara inisiator sebagai kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Pembentukan Pokjanas ini menunjukkan bagaimana keberlangsungan kerja sama lintas batas yang diterapkan dalam tingkat multilateral dapat berpengaruh dalam

upaya teknis penanggulangan deforestasi di masing-masing negara. Pembentukan Pokjanas sendiri juga dilakukan untuk melaksanakan program-program utama yang telah ditetapkan oleh setiap negara inisiator HoB, antara lain pengelolaan kawasan lintas batas negara (*Transboundary management*), pengelolaan kawasan lindung (*protected areas management*); pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (*Sustainable natural resources management*), pengembangan ekowisata (*Ecotourism development*) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*Capacity building*). Masing-masing program melihatkan adanya bentuk perangkulan berbagai pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat ataupun daerah, NGO, perusahaan swasta serta masyarakat luas, terutama yang mendiami kawasan pulau Kalimantan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dunne, Tim; Kurki, Milja; Smith, Steve, 2007. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, 2nd Edition. Oxford University Press.

Dros, Jan Marteen, 2003. *Accommodating Growth: Two scenarios for oil palm production growth*. Advice and Research for Development and Environment.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, 2012. *International Relations Theory, fifth edition*. Perason Education.

Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil dan Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, 1996: Pustaka Pelajar.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, *Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air*, 2010, Jakarta: Kementerian Pertanian.

Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, 1999, New York: W.W. Norton & Company.

Mark E. Hager (editor), *Nonprofit Management and Leadership*, 2003

Thornton, Allan; Currey, Dave, *To Save An Elephant*, Doubleday: 1991

Internet, PDF dan Media Lainnya:

"Global Deforestation", http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/deforest/deforest.html, diakses pada 10 Oktober 2014.

Sejarah HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-on-track, diakses pada 10 Oktober 2014.

"Visi dan Misi HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-vision, diakses pada 10 Oktober 2014.

"Islands By Land Area". http://islands.unep.ch/Tiarea.htm, diakses pada 10 Oktober 2014.

"Borneo's Geography". http://www.mongabay.com/borneo.html, diakses pada 10 Oktober 2014.

Djuweng S.: Are the Dayak on the Way to Extinction? ; dimuat di harian The Jakarta Post, 10 Oktober 1997.

“Penebangan Dan Transmigrasi”, http://world.mongabay.com/indonesian/borneo.html, diakses pada 10 Oktober 2014.

World Rainforest Movement: Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation: Asia, http://www.wrm.org.uy/deforestation/Asia/Indonesia.html , diakses pada 10 Oktober 2014.

Malaysian Oil Palm Statistics 2003. Economics & Industry Development Dvision Malaysian Palm Oil Board http://161.142.157.2/home2/home/stac03_area1.htm, diakses pada 10 Oktober 2014.

“Kelapa Sawit”. http://world.mongabay.com/indonesian/borneo.html, diakses pada 10 Oktober 2014.

“Strategi HoB”, http://heartofborneo.or.id/id/about/understanding-heart-of-borneo, diakses pada 10 Oktober 2014.

Sri Harini Wijayanti, GREEN THEORY SEBAGAI TEORI KONTEMPORER DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL, http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105200-Teori%20Hubungan%20Internasional%20SOH201-GREEN%20THEORY%20SEBAGAI%20TEORI%20KONTEMPORER%20DALAM%20ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html diakses pada 10 Oktober 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi),Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), http://Kbbi.Web.Id/Pengaruh diakses pada 13 Oktober 2014.

“About”, http://www.iucn.org/secretariat/about, diakses pada 5 September 2015

“WWF in the 60’s”, http://wwf.panda.org/who_we_are/history/sixties/, diakses pada 5 September 2015.

“How the Observer brought the WWF into being” https://www.theguardian.com/environment/2010/nov/07/wwf-world-wildlife-fund-huxley, diakses pada 28 Mei 2015

“50 Years On, We’re Changing The Picture”, http://www.wwf.org.uk/wwf_articles.cfm?unewsid=4527, diakses pada 28 Mei 2015.

“WWF In The 70’s”, http://wwf.panda.org/who_we_are/history/seventies/, diakses pada 28 Mei 2015.

"WWF In The 80's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/eighties/, diakses pada 28 Mei 2015.

"WWF stamp collection helps conservation", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/eighties/, diakses pada 7 Juli 2015.

"The Assisi Declaration of Nature", http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/environment/histewardshiprev2.shtml, diakses pada 28 Mei 2017.

"WWF In the 90's", http://wwf.panda.org/who_we_are/history/nineties/, diakses pada 28 Mei 2015.

"CBD COP-12", http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/policy/conventions/cbd/cop12/, diakses pada 7 Juli 2015.

"Case study on river management: Kafue Flats", http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/rivers/irbm/cases/kafue_river_case_study/, diakses pada 28 Mei 2015.

"50 Tahun WWF di Indonesia", http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/50_tahun_wwf_di_indonesia/, diakses pada 26 Februari 2015.

"Sejarah WWF-Indonesia", http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/sejarah/, diakses pada 26 Februari 2015.

"Earth's most special places", http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/, diakses pada 26 februari 2015.

"Apakah Inisiatif Heart of Borneo Itu?", http://www.hobgreeneconomy.org/id/about/, diakses pada 21 Januari 2017.

"Organisasi HoB", http://heartofborneo.or.id/id/about/heart-of-borneo-in-indonesia, diakses pada 28 Mei 2016.

"Most of Borneo's lowland forests could be lost within the next decade – WWF", http://wwf.panda.org/ , diakses pada 1 Juli 2016.

"Mengintip Sejarah Deforestasi di Indonesia", http://www.burung.org/ , diakses pada 1 Juli 2016.

"Sejarah Dampak El Nino Di Indonesia", http://www.bmkg.go.id/, diakses pada 2 Juli 2016

"Daftar Daerah yang Memiliki Jumlah Lahan Gambut Terluas" , http://jokowarino.id/, diaskes pada 2 Juli 2016

"Lahan Gambut", https://jurnalbumi.com/, diakses pada 2 Juli 2016

"Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?", http://www.mongabay.co.id/, diakses pada 2 Juli 2016

"Perubahan Iklim, 'Pencegahan Deforestasi' dan Indonesia", http://www.downtoearth-indonesia.org/, diakses pada 3 Juli 2016

"Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah", http://terokaborneo.com/, diakses pada 4 Juli 2016

"Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah", http://nationalgeographic.co.id/, diakses pada 4 Juli 2016

"Ini Penjelasan Eks Gubernur Kalteng Soal Pergub Izin Bakar Hutan", http://news.detik.com/, diakses pada 4 Juli 2016

"The Kuala Lumpur Accord on Environment and Development Issued by The ASEAN Ministers for the Environment at The Fourth ASEAN Ministers for the Environment Meeting", http://environment.asean.org/, diakses pada 4 Juli 2016

"ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution", http://environment.asean.org/asean-cooperation-on-transboundary-haze-pollution/, diakses pada 4 Juli 2016

"Greenpeace : Melindungi hutan ASEAN dapat mencegah perubahan iklim", http://www.greenpeace.org/, diakses pada 4 Juli 2016

"Greenpeace Tuntut ASEAN Terapkan Zero Deforestasi", https://tempo.co/, diakses pada 4 Juli 2016

"REDD, Apakah Itu?", http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-redd/redd-apakah-itu, diakses pada 1 Mei 2017

"Pengembangan Ekowisata", http://heartofborneo.or.id/id/about/understanding-heart-of-borneo, diakses pada 1 Mei 2017.

"Chapter 17: Kalimantan Forests and Climate Partnership, Central Kalimantan, Indonesia", http://www.cifor.org/redd-case-book/case-reports/indonesia/kalimantan-forests-climate-partnership-central-kalimantan-indonesia/, diakses pada 1 Mei 2017.

"Demonstrating Approaches to REDD+ Lessons from the Kalimantan Forests and Climate Partnership", San Giorgio Group Case Study, Climate Policy Initiative, 2013.

"Minister Supports "Kaltim Green" Policy, http://www.antaranews.com/en/news/67463/minister-supports-kaltim-green-policy, diakses pada 1 Mei 2017.

"Program Kaltim Green", http://web.bappedakaltim.com/berita-284-green.html, diakses pada 1 Mei 2017.

"Kebijakan-Kebijakan yang Mendukung Kaltim Green", http://www.adityaperdana.web.id/kebijakan-kebijakan-yang-mendukung-kaltim-green.html#ixzz184CdxZW1, diakses pada 1 Mei 2017.

"Gubernur Minta Partisipasi Swasta Untuk "Kaltim Green", Antaranews.com, diakses pada 1 Mei 2017.

"Keren Nih, Kaltim Sudah Tanam 315 Juta Pohon dalam 6 Tahun", http://www.kalamanthana.com/2016/05/23/keren-nih-kaltim-sudah-tanam-315-juta-pohon-dalam-6-tahun/, diakses pada 1 Mei 2017.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Stern, N. 2007. *Stern Review: The economics of climate change*. London, UK, H.M. Treasury.

Langner A. and Siegert F.: *Assessment of Rainforest Ecosystems in Borneo using MODIS satellite imagery*, June 2005.

Fuller D.O, Jessup T.C and Salim, A.: *Loss of Forest Cover in Kalimantan, Indonesia, since the 1997-1998 El Niño*. Conservation Biology, pp.249-254 Volume 18, No1, February 2004

Faisyal Rani, "*Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)*", Jurnal Transnasional Vol. 4, No. 2 (Februari 2013)

Hitchner, Sarah L.: *Heart of Borneo as a 'Jalan Tikus': Exploring the Links Between Indigenous Rights, Extractive and Exploitative Industries, and Conservation at the World Conservation Congress 2008*. Conservation and Society, Year 2010, Volume 8, Issue 4

Okamoto S.: *The Growth of Oil Palm Plantations and Forest Destruction in Indonesia*; Japan NGO Network on Indonesia (JANNI), nirtanggal.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2007. *Report of the Conference of Parties on its thirteenth session, Bali, Indonesia, 3–15 December 2007*. Geneva, Switzerland, UN.

Romli Atmasasmita, *Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana terhadap Kejahatan Tansnasional Terorganisasi*, artikel dalam Padjadjaran Jilid XXIV No.2 tahun 1996.

WWF Germany, *Borneo: Treasure Island at Risk*, June 2005.

Global Forest Watch, Global Forest Watch Indonesia, World Resources Institute: *The State of the Forest, Indonesia*, 2002

Global Forest Watch, Global Forest Watch Indonesia, World Resources Institute: The State of the Forest, Indonesia, 2002

Ardiansyah, Fitrian; Susanto Purwo, *Rangkuman Laporan Pertama WWF-Indonesia Terkait Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat,* WWF Indonesia, Maret 2005.

The World Bank, *Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition*, February 2001

Lewis, David, *Nongovernmental Organizations, Business, and the Management of Ambiguity*, December 1998

Tim Redaksi WWF-Indonesia, *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau*, 2014.

Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo (HoB), *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) 2015-2019*, 2014

Forest Watch Indonesia Indonesia & Washington D.C.:, *Keadaan Hutan Indonesia. Bogor , Indonesia*, 2001.

Center for International Forestry Research, *Laju dan Penyebab Deforestasi Di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya* (Occasional Paper No. 9), Dec 1996.

Syahirsyah, Jimmy, *Penyelamatan Ekosistem Kalimantan dalam Penerapan MP3EI*, Mei 2012.

WWF-Indonesia, *Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca?*. 2005.

Muhajir, Mumu, *Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah*, Kertas Kerja Epistema No.06/2010, Jakarta: Epistema Institute.

Heart of Borneo National Working Group, *National Strategic Plan of Actions: Bridging Conservation and Sustainable Development in Three Countries*, 2009.

Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28019/node/1019/peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2008, diakses pada 1 Mei 2017.